

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketujuh** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola **212.351 m²**; Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW) **100%**; Luas wilayah produktif **39%**; Luas wilayah industri **44%**; Luas wilayah banjir **0,00%**; Luas wilayah kekeringan **0,00%**; Luas wilayah perkotaan **23 %**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.377.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.362.255.100,- atau 95,9%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya satu dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Teluk Bintan.
- (2) Kegiatan Penyusunan Database Prasarana Infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.315.270.000,- dan realisasi anggaran sebesar 96,6% atau Rp.304.636.700,- Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya satu dokumen database prasarana infrastruktur.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bintan, dengan alokasi anggaran Rp.457.316.050,- dan realisasi sebesar Rp.435.909.910,- atau 95,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan 11 SKPD teknis terkait dan instansi vertikal, monitoring lapangan dan evaluasi capaian penataan ruang daerah.
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bintan, dengan alokasi anggaran Rp.205.094.800,- dan realisasi sebesar Rp.202.258.720,- atau 98,61%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan ruang daerah Kabupaten Bintan 10 kecamatan.
- (3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Inventarisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.133.965.300,- atau 89,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah 1 buah aplikasi system informasi dalam rangka peningkatan kapasitas penataan ruang daerah Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pemanfaatan Tata Ruang tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketujuh** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA **ADA**; Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA **ADA**; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA **ADA**; Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD **100%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Aparatur dan Pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp.180.152.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.162.756.320,- atau sebesar 90,34%, Hasil dari Kegiatan ini adalah Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebanyak 19 SKPD terdiri dari
- (2) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.180.152.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.162.756.320,- atau sebesar 90,34%, Output dari Kegiatan ini adalah diterbitkannya 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bintan terkait standar operasional prosedur tentang perencanaan pembangunan dalam rangka standarisasi tata laksana yang dilakukan pegawai BAPPEDA dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik individual pegawai maupun organisasi BAPPEDA Kabupaten Bintan.

menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara konkrit perbaikan kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas.

- (3) Kegiatan penyusunan rancangan RPJMD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.350.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.312.203.900,- atau 89,10%. Hasil dari kegiatan penyusunan rancangan RPJMD adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Bintan yang disusun dalam 1 dokumen RPJMD.
- (4) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bintan dengan alokasi anggaran Rp.245.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.215.835.000,- atau 87,81% hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 yang disusun dalam bentuk 1 Dokumen RKPD.
- (5) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRENBANGDA 2011-2015 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bintan dengan alokasi anggaran Rp.66.532.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.65.184.200,- atau 97,97%. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Kegiatan penyelenggaraan Forum SKPD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.240.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.165.037.650,- atau 68,62%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya rumusan akhir rencana kerja SKPD tahun 2015 melalui pelaksanaan forum SKPD yang diikuti oleh SKPD dilingkungan pemerintah Kab. Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan.
- (7) Kegiatan Survey Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan

dengan alokasi anggaran Rp.153.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.149.468.120,- atau 97,69%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi yang akurat tentang rencana kegiatan pembangunan melalui survey lokasi rencana pembangunan di 10 kecamatan.

- (8) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bintan dengan alokasi anggaran Rp.376.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.344.188.650,- atau 91,42%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2016 melalui penyelenggaraan musrenbang tingkat Kabupaten yang diikuti unsur SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, DPRD, KADIN, Tokoh Masyarakat, PMDN, Ormas dengan jumlah peserta 200 Orang.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bintan dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.106.681.250,- atau 88,90% hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya rencana program dan kegiatan kecamatan tahun 2016 melalui asistensi Bappeda pada musrenbang di 10 Kecamatan.
- (10) Penyusunan Perencanaan Kawasan Bidang Sumber Daya Alam dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.279.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.269.181.322,- atau 96,34%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen masterplan minapolitan Kabupaten Bintan.
- (11) Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.192.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.185.731.180,- atau 96,73%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Bintan.

- (12) Penyusunan Rencana Induk Kepelabuhanan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.738.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.698.639.340,- atau 94,60%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen Rencana Induk Kepelabuhanan Kabupaten Bintan.
- (13) Penyusunan Masterplan Kawasan Terpadu Kijang Kota dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.380.650.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.358.155.880,- atau 94,09%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen Masterplan Kawasan Terpadu Kijang Kota.
- (14) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Updating Database Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.36.892.500,- atau 92,23%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Updating Database Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam di 10 kecamatan Kabupaten Bintan.
- (15) Kegiatan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bintan dengan alokasi anggaran Rp.243.400.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.220.809.804,- atau 90,72%. Hasil kegiatan ini adalah Perda RPJPD Kab. Bintan Tahun 2005-2025.
- (16) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.237.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.198.805.022,- atau 83,71%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan peserta dari seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD di Kab. Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya pemahaman aparat SKPD dalam kemampuan perencanaan, untuk itu perlu peningkatan kemampuan melalui diklat perencanaan.

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Koordinasi & Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bintan dengan Aklokasi Anggaran Rp.238.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.205.801.610,- atau sebesar 86,33%, Hasil dari Kegiatan ini adalah Terintegrasinya Data Profil Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan sejumlah 79 Orang yang terdiri dari : 36 Orang dari Desa, 15 Orang dari Kelurahan; 10 Orang dari Kecamatan; 10 Orang Kasi Pemerintahan Kecamatan; 8 Orang SKPD Terdiri dari :
- (2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RPJMD Desa se Kabupaten Bintan. Dengan Alokasi Anggaran Rp.222.312.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.178.972.260,- atau sebesar 80,5 %. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya 36 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) se Kabupaten Bintan
- (3) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBD Desa se Kabupaten Bintan. Dengan Alokasi Anggaran Rp.88.902.500,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.76.566.780,- atau sebesar 86,12 %. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya 36 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se Kabupaten Bintan.

Tabel 4.20 : Pagu Indikatif Dana Desa dan ADD Tahun 2016

PAGU INDIKATIF DANA DESA DAN ADD TAHUN 2016						
No	Nama Desa	Dana Desa (APBN)	ADD (APBD)	Total pagu	Penghasilan tetap (30%)	Belanja Pembangunan (70%)
	Gunung Kijang	665.353.649	1.140.312.869	1.805.666.518	342.093.861	798.219.008
	Malang Rapat	681.055.878	1.156.981.154	1.838.037.032	347.094.346	809.886.808
	Teluk Bakau	678.546.835	1.154.317.745	1.832.864.579	346.295.323	808.022.421
	Lancang Kuning	656.646.920	1.131.070.471	1.787.717.391	339.321.141	791.749.330
	Bintan Buyu	652.855.781	1.127.046.088	1.779.901.869	338.113.826	788.932.261
	Pangkil	645.082.373	1.118.794.432	1.763.876.804	335.638.330	783.156.102
	Penaga	687.700.667	1.164.034.753	1.851.735.420	349.210.426	814.824.327
	Pengujan	652.843.925	1.127.033.502	1.779.877.427	338.110.051	788.923.451
	Tembeling	668.309.742	1.143.450.830	1.811.760.572	343.035.249	800.415.581
	Batu Lepuk	680.578.198	1.156.474.085	1.837.052.282	346.942.225	809.531.859
	Kampung Hilir	705.038.842	1.182.439.634	1.887.478.477	354.731.890	827.707.744
	Kampung Melayu	663.550.080	1.138.398.338	1.801.948.418	341.519.501	796.878.836
	Pulau Mentebung	641.929.127	1.115.447.188	1.757.376.315	334.634.156	780.813.031
	Pulau Pinang	630.462.927	1.103.275.546	1.733.738.473	330.982.664	772.292.882
	Kukup	675.391.987	1.150.968.800	1.826.360.786	345.290.640	805.678.160
	Pengikik	646.662.301	1.120.471.562	1.767.133.863	336.141.469	784.330.094
	Berakit	768.115.576	1.249.397.070	2.017.512.646	374.819.121	874.577.949
	Ekang Anculai	636.011.434	1.109.165.417	1.745.176.851	332.749.625	776.415.792
	Pengudang	728.657.053	1.207.510.920	1.936.167.972	362.253.276	845.257.644
	Sebong Lagoi	709.389.800	1.187.058.278	1.896.448.078	356.117.483	830.940.795
	Sebong Pereh	698.681.648	1.175.691.323	1.874.372.972	352.707.397	822.983.926
	Sri Bintan	687.977.840	1.164.328.979	1.852.306.818	349.298.694	815.030.285
	Toapaya	639.195.537	1.112.545.417	1.751.740.954	333.763.625	778.781.792
	Toapaya Utara	643.663.768	1.117.288.549	1.760.952.317	335.186.565	782.101.985
	Toapaya Selatan	743.649.506	1.223.425.762	1.967.075.268	367.027.729	856.398.033
	Mantang Baru	636.027.943	1.109.182.942	1.745.210.884	332.754.882	776.428.059
	Mantang Besar	630.597.137	1.103.418.014	1.734.015.151	331.025.404	772.392.610
	Mantang Lama	616.221.452	1.088.157.886	1.704.379.338	326.447.366	761.710.520
	Dendun	661.213.267	1.135.917.755	1.797.131.022	340.775.327	795.142.429
	Kelong	709.500.308	1.187.175.585	1.896.675.893	356.152.675	831.022.909
	Mapur	634.596.239	1.107.663.155	1.742.259.394	332.298.946	775.364.208
	Numbing	777.877.611	1.259.759.700	2.037.637.310	377.927.910	881.831.790
	Air Gelubi	639.519.907	1.112.889.743	1.752.409.650	333.866.923	779.022.820
	Busung	631.198.150	1.104.056.003	1.735.254.152	331.216.801	772.839.202
	Teluk Sasah	759.570.639	1.240.326.418	1.999.897.057	372.097.925	868.228.493
	Kuala Sempang	677.402.954	1.153.103.489	1.830.506.444	345.931.047	807.172.442
	TOTAL	24.261.077.000	41.378.579.399	65.639.656.399	12.413.573.820	28.965.005.579

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bintan

- (4) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Identifikasi Bobot Desa Kabupaten Bintan. Dengan Alokasi Anggaran Rp.115.699.740,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.109.737.380,- atau sebesar 94,85%. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Workshop Perencanaan Pembangunan Untuk Perangkat Desa se Kabupaten Bintan. Dengan Alokasi Anggaran Rp.264.452.400,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.224.854.390,- atau sebesar 85,03 %. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan 108 sumber daya aparatur perangkat desa se Kabupaten Bintan.

4) Program Inventarisasi Sumber Daya Alam

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Penyusunan Database Sumber Daya Alam dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.422.100.000,- dan realisasi sebesar Rp.400.364.690,- atau 94,85%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen kompilasi database sumberdaya alam Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Inventarisasi Sumber Daya Alam tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

5) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Alokasi Anggaran Rp.105.417.300,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.83.009.100,- atau sebesar 78,74%. Hasil dari Kegiatan ini adalah tersedianya laporan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bintan untuk 38 SKPD.

- (2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.166.055.000,- dan realisasi sebesar Rp.159.089.980,- atau 95,81%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampainya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD, tepat pada waktunya.
- (3) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.178.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.164.731.560,- atau 92,13%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan 2010-2015. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampainya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan 2010-2015 kepada DPRD, tepat pada waktunya.
- (4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.267.914.000,- dan realisasi sebesar Rp.256.369.050,- atau 95.69%. Hasil dari kegiatan ini adalah terkendalinya rencana pembangunan di Kabupaten Bintan yang didanai dari APBD melalui penyusunan Laporan Bulanan, pelaksanaan Pemantauan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD, pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian.
- (5) Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan SKPD, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp.77.378.550,- atau 91,64%. Hasil kegiatan ini terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan SKPD serta terintegrasinya data laporan bulanan kegiatan SKPD kedalam sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi (SIMONEV).

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman aparatur SKPD dalam menyusun laporan LKPJ yang informatif
- b. Masih lambatnya SKPD menginput/mengupdate laporan fisik dan keuangan bulanan yang seharusnya disampaikan pada awal bulan

2) Solusi

- a. Memberikan bimtek LKPJ agar lebih meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para peserta, khususnya dalam membuat laporan pertanggung jawaban SKPD mengenai tugas-tugasnya, memahami dan mengetahui secara umum tentang jenis-jenis laporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. adalah perlunya dibuat Peraturan Kepala Daerah yang menekankan pentingnya laporan bulanan SKPD disampaikan tepat waktu.

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kemiskinan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi dana sebesar Rp.241.283.300,-. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2015,

kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.198.244.500,- atau 82,16 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan penduduk yang telah menerima manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana APBN serta APBD. Adapun sasarannya adalah 10 Kecamatan se-Kabupaten Bintan melalui konsolidasi data bersama dengan SKPD terkait dan survey lapangan. Terlaksananya program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam peningkatan efektifitas program-program bantuan untuk rumah tangga sasaran.

- (2) Kegiatan Koordinasi Pengendalian & Evaluasi Program-Program Kemiskinan, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi dana sebesar Rp.310.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.267.965.930,- atau 84,44%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian/ evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana cost sharing Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Melalui rapat koordinasi pembangunan serta pelaksanaan monitoring di 10 Kecamatan.
- (3) Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi MDGS, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi dana sebesar Rp.170.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.124.200.500,- atau 73,05%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian dengan 8 Tujuan dan 49 indikator MDG's di Kabupaten Bintan, adapun tujuan tersebut adalah : (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan. (2) Mencapai pendidikan dasar. (3) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (4) Menurunkan angka kematian balita. (5) Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan. (6) Memerangi penularan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. (8). Membangun kemitraan global dalam

pembangunan. Dari 8 tujuan dan 49 indikator MDGs di atas dapat dilaporkan bahwa: (1) Tercapai, 43 indikator atau 87,76%; (2) Akan tercapai, 6 indikator atau (12,24%); (3) Perlu Perhatian Khusus 0 atau 0%.

- (4) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Kabupaten Sehat, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Dengan alokasi dana sebesar Rp.315.299.300,-, dengan realisasi sebesar Rp.295.107.200,- atau sebesar 93,6%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Kabupaten Sehat dengan baik dapat dibuktikan dengan Kabupaten Bintan yang mendapat penghargaan Swasti saba sebagai salah satu Kabupaten /Kota sehat di Indonesia.
- (5) Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah (PELD) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.440.000.000, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp.232.862.721,- atau sebesar 52,92%. Adapun output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya monitoring dan pembinaan kelompok di dua kecamatan terdiri dari kelompok kube dan kelompok budidaya, (dua Kelompok), Tersusunnya AD/ART Cluster: (1) AD/ART Cluster Budidaya, (2) AD/ART Kelompok Kube Desa Busung.
- (6) Kegiatan Evaluasi Program Ekonomi Kabupaten Bintan 2010-2015 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dengan jumlah anggaran sebesar Rp250.000.000,- adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Evaluasi Program Ekonomi Kabupaten Bintan 2010-2015 di 10 kecamatan. Dengan realisasi terealisasi sebesar Rp.182.321.199,- atau sebesar 72,92%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Sosial tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

7) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Koordinasi PPLS, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Dengan alokasi dana sebesar Rp.200.750.000,- dengan keluaran terlaksananya program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan sinkronisasi data *by name by address* rumah tangga sasaran. Berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2015, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.167.367.380,- atau sebesar 83,37 %.
- (2) Kegiatan Pelatihan Proo Poor Planning Budgeting dan Monitoring (P3BM), Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Dengan alokasi dana sebesar Rp.372.000.000,-, berdasarkan laporan fisik dan keuangan bulan Desember 2015, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.315.202.250,- atau sebesar 84,73%. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta pelatihan dapat menyusun rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan peserta memahami bagaimana memonitoring dan evaluasi program.

b. Permasalahan dan Solusi

Serapan anggran yang masih rendahnya serapan di sebabkan oleh biaya honor tenaga pendamping lapangan tidak dapat dibayarkan hal ini terjadi karen pihak provinsi telah menugaskan pegawai tenaga kontrak (PPTK) dan dibayar setiap bulannya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan perlu adanya peningkatan Intensitas koordinasi dalam pelaksaan kegiatan.

Pada tahun 2015 ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan (dibatalkan) dikarenakan dampak dari efisiensi anggaran yaitu (1) Kegiatan Penyusunan Pola Konsumsi Kabupaten Bintan dan (2) Pemantauan, Evaluasi Dan Penilaian Pertambangan Umum.

4.1.7. URUSAN PERUMAHAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Perumahan adalah sebagai berikut : Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik) **31.447 RT Rumah Tangga**; Proporsi cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum **0,56%**; Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih **93%**; Persentase rumah tinggal bersanitasi **77 %**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembangunan SPAM Perdesaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.500.000 terealisasi sebesar Rp.385.473.180 atau sebesar 98,21% keluaran dari kegiatan ini adalah Peningkatan SPAM Perdesaan (RO) Desa Dendun Kec. Mantang (Bangunan Intake dan Mekanikal Elektrikal) dan Peningkatan/ Optimalisasi Sarana Air Bersih Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan. hasil adalah Terlaksananya Peningkatan SPAM dan Optimalisasi Sarana Air Bersih di Kec.Mantang dan pusat pemerintahan Kab.Bintan
- (2) Kegiatan Operasional pengelolaan UPT air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.000.000 terelalisasi sebesar Rp.657.475.450 atau sebesar 95,01%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Perawatan Konstruksi Jaringan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perawatan Pembangkit Listrik, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perawatan Instalasi Listrik dan Telepon, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin.

Hasil adalah Terlaksananya operasional pengelolaan UPT air bersih Dinas Pekerjaan Umum Bintan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM di 10 Kecamatan.

- (3) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan SPAM (DAK - REGULER) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.193.613.000 terealisasi sebesar Rp.2.129.707.983 atau 99,53% Keluaran dari kegiatan ini adalah Peningkatan SPAM di 5 Lokasi yaitu Desa Mantang baru Kec.Mantang, Desa Penaga,Desa Pengujan,dan Desa Bintan Buyu Kec.Teluk Bintan, dan Kec.Bintan Utara dan Pembangunan SPAM Desa Sri Bintan Kec. Teluk Sebong (Brownclapting, sambungan rumah murah, accessories pipa dan pipa HDPE).

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan SPAM (DAK).

- (4) Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan SPAM (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000 terealisasi sebesar Rp.83.782.190 atau sebesar 98,57%. Keluaran dan Hasil dari kegiatan ini adalah adalah Terlaksananya Operasional Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK).
- (5) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK - REGULER) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.791.449.000 terealisasi sebesar Rp.1.791.449.000,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah

Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk dan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Berakit Kec. Teluk Sebong Adapun hasilnya adalah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah.

- (6) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK- TAMBAHAN) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.940.873.500 terealisasi sebesar Rp.940.873.500 atau sebesar 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Adapun hasilnya adalah Terlaksananya pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dan PS sampah terpadu 3R.
- (7) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan SPAM (DAK TAMBAHAN) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.436.100.000 terealisasi sebesar Rp.1.406.198.210 atau sebesar 97,92%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan dan peningkatan SPAM (DAK TAMBAHAN) dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan SPAM Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam (Accessories pipa, pipa HDPE, pompa dan sambungan rumah murah)
 - b) Peningkatan SPAM IKK Seri Kuala Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (Accessories pipa, pipa HDPE, dan sambungan rumah murah)
 - c) Peningkatan SPAM Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (sambungan rumah murah, Accessories pipa, pipa HDPE)

- d) Peningkatan SPAM Kelurahan Sei Enam Kec. Bintang Timur (Accessories pipa, pipa HDPE, browncapting dan sambungan rumah murah)
- (8) Kegiatan Pendamping dan Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.339.137.500 terealisasi sebesar Rp.336.747.626 atau sebesar 99,30%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya operasional pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sanitasi (DAK).
- (9) Kegiatan Pendamping dan Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Sanimas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000 terealisasi sebesar Rp.64.016.840 atau sebesar 71,13%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan kepada pengelola sanimas. Adapun hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Operasional Pendamping dan Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Sanimas.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pengendalian Banjir

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran / Sungai dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.617.000.000. terealisasi sebesar Rp.596.882.737 atau sebesar 96,74%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Normalisasi Saluran/ Sungai dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut Normalisasi Saluran Drainase RT.02/ RW. 01, RT. 02/RW.02, RT 03/ RW 03, RT.01/ RW.

03 dan Pembuatan Box Culvert (1 M X 2 M) RT.02/RW.01 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang (1 Keg).

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengendalian Banjir tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Pembangunan saluran drainase lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.334.250.000 terealisasi sebesar Rp.5.321.434.262 atau sebesar 99,84%, dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan, perbaikan dan normalisasi saluran drainase dengan total panjang penanganan saluran drainase 6.050 m' , normalisasi saluran sepanjang 2.600 M', pembangunan dwiker 1 buah dan gorong – gorong 1 buah.Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu, Kec.Seri Kuala Lobam,Kec.Bintan Utara,Kec.Teluk Sebong dan Kec.Bintan Timur. Adapun hasil adalah Terlaksananya Pembangunan Parit/ Drainase Lingkungan

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembangunan Pelantar/ Tambatan Perahu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.022.010.500 terealisasi sebesar Rp.1.005.603.504 atau sebesar 98,39%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pembangunan

Pelantar Permukiman Desa Air Gelubi Kec. Bintang Pesisir (85M x 1,5M) dan Pembangunan Pelantar Permukiman Pulau Telang Kecil Desa Mantang Besar Kec. Mantang (150M X 1,5M). Hasilnya adalah Terlaksananya Pembangunan Pelantar Permukiman/Tambatan Perahu Nelayan

- (2) Kegiatan Operasional Penunjang Program P2KP (PNPM Perkotaan) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.000.000 terealisasi Rp.135.206.600 atau sebesar 77,26%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional Penunjang Program P2KP (PNPM Perkotaan)
- (3) Kegiatan Dukungan Teknis Pelaksanaan Program DAK Desa/Kelurahan, RTLH dan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 terealisasi Rp.140.400.050 atau sebesar 93,60%. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya Dukungan Teknis Pelaksanaan DAK Desa/Kelurahan, RTLH dan Penanggulangan Kemiskinan
- (4) Kegiatan Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi Rp.49.830.000 atau sebesar 99,66%. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana PSD RTH.
- (5) Kegiatan Pembangunan jalan semenisasi/paving block dan buras dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.527.016.000 terealisasi Rp.2.493.636.333 atau sebesar 98,68%, dengan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pembangunan jalan buras beton dengan total penanganan sebesar 5786 M2, pembangunan jalan semenisasi buras dengan panjang penanganan 940 M2 dan pembangunan paving blok 4719 M2. Yang dilaksanakan di Kec.Bintang Timur, Kec.bintang Utara, Kec.Gunung Kijang, Kec.Toapaya dan

Kec.Tambelan. Hasil dari kegiatan adalah Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan, Semenisasi/Paving Block / Buras dan Sarana Pendukung.

- (6) Kegiatan Operasional Pembinaan & Penunjang Program Pembangunan Sarana Prasarana Di Kawasan Perbatasan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi Rp.60.457.280 atau sebesar 80,61%. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya Operasional Pembinaan Pengendalian Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Perbatasan
- (7) Kegiatan Operasional Pembinaan & Pengendalian Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000 terealisasi Rp.146.621.902 atau sebesar 73,31%. Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran adalah Tersedianya Operasional Pembinaan dan Pengendalian Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
- (8) Kegiatan Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.550.000 terealisasi Rp.158.804.100 atau sebesar 96,51%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pembangunan Batu Miring Jl.Mawar RT.02 RW.07 Kp. Pisang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (110 M'). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan Batu Miring Pantai
- (9) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.000.000 terealisasi Rp.44.495.000 atau sebesar 98,58%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan Teknis rehabilitasi pasar baru Kel.Tanjung Uban Selatan Kec.Bintan Utara (Lanjutan)

(10) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.991.371.000 terealisasi Rp.3.813.053.574 atau sebesar 95,53%, Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan berikut :

- a) Jalan Semenisi beton bertulang dengan total penanganan sepanjang 3.200 M2, yang dilaksanakan di Kec.Bintan Timur.
- b) Pembangunan Pembuangan Sementara Sampah Terpadu 3R Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan
- c) Pembangunan Pembuangan Sementara Sampah Terpadu 3R Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Pembangunan PJU 166 titik di 3 kecamatan, yaitu Kec.Toapaya, Kec.Bintan Timur, Kec.Bintan Utara

Hasilnya adalah terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum (JPU), PS Sampah Terpadu 3 R dan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Komunal.

(11) Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi Rp.57.978.198 atau sebesar 95,53%. Hasilnya adalah terlaksananya Operasional Pengelolaan Kegiatan PEmbangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK).

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut : Jumlah klub olahraga **215 Klub**; Jumlah gedung olahraga **10 Unit**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Kepemudaan

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Kebangsaan Pembinaan Kemasyarakatan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dengan pagu anggaran Rp.1.320.000.000 dan realisasi Rp.1.318.1350.085 atau 99,86%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya seleksi dan pemusatan paskibraka tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 1 tim. Hasil Kegiatan ini adalah terselenggaranya pengibaran bendera pusaka, meningkatnya kemampuan baris berbaris, menumbuhkan rasa cinta dan bela negara, serta meningkatkan kedisiplinan pelajar, memupuk jiwa kepemimpinan.

Dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

- **Jumlah Organisasi Pemuda** yang didata dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan tahun 2015 mencapai 60 organisasi.
- **Kegiatan Kepemudaan**, untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Sampai dengan dengan 2015 tercatat sebanyak 3 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Belum tersedianya kegiatan Pelatihan yang mendukung kreatifitas Pemuda.

2) Solusi

Perlu diadakannya Pelatihan untuk menyalurkan kreatifitas Pemuda dalam

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan Atlit oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.490.265.000 dan realisasi Rp.484.344.610 atau 98,79%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan atlit untuk POPDA dan PORPROV pada 10 cabang olahraga. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya atlit beprestasi dan kompetensi pada 10 cabang olahraga.
- (2) Kegiatan Liga Pelajar Indonesia oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp.147.600.000 dan realisasi Rp.147.114.450 atau 99,67%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perlombaan Liga Pelajar Indonesia. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya lomba liga pelajar tingkat SLTP dan SLTA yang diikuti sebanyak 48 tim dan terseleksi atlit sepak bola pelajar sebanyak 8 tim.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar (BAPOPSI) Dalam Olahraga oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan dengan pagu anggaran Rp.44.555.000 dan realisasi Rp.44.492.900 atau 99,86%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan olahraga pelajar di setiap Kecamatan. Hasil kegiatan ini adalah

tersedianya atlit olahraga pelajar di setiap wilayah BAPOPSI di Kecamatan.

- (4) Kegiatan Pembinaan Kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pemuda Bintan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan Realisasi Fisik Kegiatan 100% dengan pagu anggaran Rp.579.700.000 dan realisasi Rp.570.229.480 atau 98,37%. Output dari kegiatan terselenggaranya kegiatan kepramukaan di Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya kemandirian, kedisiplinan dan kerja sama anggota pramuka.
- (5) Kegiatan Penyediaan Operasional KNPI Kabupaten BIntan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dengan Realisasi Fisik Kegiatan 100% dengan pagu anggaran Rp.36.000.000 dan realisasi Rp.35.875.700 atau 99,65%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Temu Wicara dan Apel Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 30 Orang dari perwakilan organisasi yang ada di Kabupaten Bintan.

Dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

- **Jumlah klub olahraga dan Jumlah organisasi olahraga** pada tahun 2015 mengalami penurunan, tercatat hingga tahun 2015 sebanyak 215 klub olahraga dan 19 organisasi olahraga yang terdaftar.
- Untuk menggairahkan pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana olahraga baik melalui Pemerintah Daerah maupun Swasta di setiap kecamatan. Tahun 2015, setelah di verifikasi kembali tercatat **Jumlah Gedung Olahraga** mencapai 10 unit, **Gelanggang/Balai Remaja** sebanyak 10 unit dan **Lapangan Olahraga** sebanyak 231 unit.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Belum terlaksananya pembinaan atlet dengan baik oleh masing-masing Pengurus Cabang.
- b) Belum tersedianya Sport Centre untuk menyalurkan minat dan bakat atlet dan kurangnya sarana dan prasarana olahraga dari seluruh cabang olahraga di Kabupaten Bintan.
- c) Belum tercukupinya pelatih yang bersertifikat.
- d) Keterbatasan dana dalam pembinaan atlet.

2) Solusi

- a) Meningkatkan intensitas pembinaan atlet oleh masing-masing Pengurus Cabang
- b) Membangun Sport Centre yang representatif agar pembinaan atlet lebih baik dan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga untuk seluruh cabang.
- c) Mengirim pelatih dari 10 cabang olahraga untuk mengikuti diklat kepelatihan.
- d) Penyediaan dana yang cukup untuk mendukung pembinaan atlet.

4.1.9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut : Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) **199 PMA/34 PMDN Investor**; Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) (dalam Jutaan) **US\$1,3/Rp.1.457.589,69**; Rasio daya serap tenaga kerja **107**; Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (dalam Milyar Rp) **1.457 T**; Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi pemerintah **ADA**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pameran/Expo Dalam Negeri Tahun 2015 dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.465.130.000,- dan realisasi sebesar Rp.395.157.643,- atau 84,96%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya mengikuti pameran dan promosi di dalam negeri. Hasil dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi potensi dan peluang investasi. Pada kegiatan ini telah terlaksananya pameran / expo sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Penyusunan Materi Promosi Dan Informasi Investasi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.890.000,- dan realisasi sebesar Rp.207.773.300,- atau 99,94%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah tersedianya materi promosi dan informasi investasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi potensi dan peluang invesatsi. Pada kegiatan ini telah adanya materi-materi promosi yang berbentuk Booklet, Leaflet, Shoothing Bag, Brosur, sovenir/ cenderamata.

b. Permasalahan dan Solusi

Alokasi anggaran pembangunan untuk penyelenggaraan kegiatan promosi daerah masih minim sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan promosi daerah baik didalam negeri maupun diluar negeri.

2) Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a. Pelaksanaan Program

- (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.688.724.000. dan realisasi sebesar Rp.670.220.028 atau 97,31%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Dengan hasil target yang diharapkan adalah terbitnya izin sebanyak 1.740 izin. Keluaran Kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan. Adapun total perizinan investasi sebanyak 1.379 izin. Dengan adanya penerapan sistem One Stop Service Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan telah optimal memberikan kemudahan bagi pelayanan perizinan, hal tersebut berdampak pada adanya penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di tahun 2011, 2013 dan Tahun 2014 dan 2015 sebagai peringkat 5 tingkat nasional dari 443 daerah di seluruh Indonesia.
- (2) Optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.347.000.000. dan realisasi sebesar Rp.341.592.700,- atau 98.44%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya optimalisasi peranan BPK Bintan wilayah Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya investasi di Kawasan FTZ Bintan baik secara kualitas dan kuantitas.

- (3) **Kinerja Peningkatan Investasi;** Perkembangan investasi perusahaan Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Bintan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 seperti yang digambarkan pada tabel diatas, secara umum adanya fluktuasi pada perkembangan investasi di Kabupaten Bintan, peningkatan dan penurunan yang tidak begitu signifikan akan tetapi berdampak pada jumlah perusahaan yang sudah beroperasi atau melakukan realisasi investasi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, perusahaan yang masuk di Kabupaten Bintan sebanyak 25 Perusahaan PMA dan 17 PMDN. Adapun jumlah perusahaan yang sudah melakukan realisasi sampai dengan tahun 2015 adalah 115 PMA dengan total investasi sebanyak 1,251 Juta US\$, sedangkan pada PMDN sebanyak 17 Perusahaan dengan total investasi sebanyak Rp.1.457.589.688.831 sehingga, Total perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 adalah 199 PMA dan 34 PMDN.

Tabel 4.21 : Perkembangan PMA dan PMDN s/d Tahun 2015

No	Status	Jumlah	Investasi (US\$/Rp)		Tenaga Kerja
			Rencana	Realisasi	
1	PMA (US\$)	199	1,427.781	1,251.371	TKI : 13.203/ TKA : 190
2	PMDN (Rp)	34	2.436.949.956,566	1,457,589,688,831	TKI : 2.537/ TKA : -

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.22 : Perkembangan Investasi Daerah PMA di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja				Jumlah Investasi (US\$)		Ket
			Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi	
			TKI	TKA	TKI	TKA			
1	S. Kuala Lobam	19	202	-	5.488	102	91.036	268.334	
2	Teluk Sebong	103	4.486	25	4.826	60	710.213	479.807	
3	Bintan Utara	20	1.844	5	103	-	52.225	465.000	
4	Bintan Timur	23	1.603	5	1.152	22	117.863	25.288	
5	Gunung Kijang	19	4.828	9	463	6	137.544	11.042	
6	Bintan Pesisir	3	30	-	82	-	1.900	1.900	
7	Toapaya	1	100	-	-	-	7.000	-	
8	Teluk Bintan	1	-	-	-	-	-	-	
9	Kabupaten Bintan	10	10	-	-	-	310.000	-	Data dari BKPM Jakarta
	Jumlah	199	13.203	44	12.144	190	1.427.781	1.251.371	

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.23 : Perkembangan Investasi Daerah PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja				Jumlah Investasi (Jutaan Rp)		Ket
			Rencana		Realisasi		Rencana	Realisasi	
			TKI	TKA	TKI	TKA			
1	Teluk Sebong	13	614	-	97	-	1.685.592,00	420.776,60	-
2	Bintan Timur	5	80	-	182	-	10.020,00	3.370,00	-
3	Gunung Kijang	8	323	-	917	-	1.403.653,95	722.407,43	-
4	Bintan Pesisir	1	-	-	1.281	-	650.526,00	371.882,47	-
5	S. Kuala Lobam	1	86	-	60	-	4.000,00	21.921,73	-
6	Bintan Utara	5	23	-	-	-	14.016,00	-	-
7	Teluk Bintan	1	70				1.830,00	-	
	Jumlah	34	1.196	-	2.537	-	2.436.949,96	1.457.589,69	-

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Tabel 4.24 : Perkembangan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2010 s/d 2015

Tahun	Status	Jumlah	Investasi (US\$ /Rp.000)		Tenaga Kerja		Realisasi (%)
			Rencana	Realisasi	TKI	TKA	
2010	PMA	121	1,613	744.948	20.630	609	46 %
	PMDN	8	577.388.077	67.068.400	1.585	-	11,62 %
2011	PMA	121	1,462	852.355	12.260	339	58,30 %
	PMDN	10	850.128.148	235.529.650	2.958	-	27,70 %
2012	PMA	127	1,477.287	902.606	13.909	326	61,11 %
	PMDN	11	1.087.799.956	428.517.081	2.972	-	39,41 %
2013	PMA	130	1,483	902.75	12.814	204	60 %
	PMDN	14	1.231.449.956,566	475.257.923.685	3.172	-	38,59 %
2014	PMA	174	1,764	916.74	12.881	209	51,96 %
	PMDN	17	2.436.949.956	1.457.589.688.000	3.693	-	59,81 %
2015	PMA	199	1,427	1,251	12.144	190	53,09 %
	PMDN	34	2.436.949.956,566	1.457.589.688.831	2.537	-	76,43 %

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

b. Permasalahan dan Solusi

Masih belum jelasnya status lahan di Kabupaten Bintan sehingga menghambat proses kegiatan promosi dan perizinan di BPMPD Kabupaten Bintan solusinya adalah Perlunya kejelasan tentang status lahan di Kabupaten Bintan.

5) Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi

a. Pelaksanaan Program

- (1) Penyusunan Database perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.040.000,- dan realisasi sebesar Rp.47.343.300,- atau 96,54%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian investasi. Keluaran Kegiatan ini

adalah terlaksananya database dan informasi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya database dan informasi perusahaan PMA /PMDN di Kabupaten Bintan. Dengan kegiatan ini telah adanya sistem pendataan yang berbasis komputerisasi dan internet sehingga memudahkan dalam proses pendataan perkembangan investasi.

- (2) Pemantauan Permasalahan Investasi di Kabupaten Bintan, dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.184.000. dan realisasi sebesar Rp.99.859.500,-. atau 96.78%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan permasalahan investasi PMA /PMDN di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pemantauan permasalahan investasi PMA / PMDN di Kabupaten Bintan. Adapun capaian dari kegiatan ini adalah jumlah PMA di Kabupaten Bintan pada tahun 2015 adalah 226 Perusahaan sedangkan PMDN sebanyak 35 Perusahaan.
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan, dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.704.000. dan realisasi sebesar Rp.59.223.700,- atau 99.20%. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada BPMPD Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

6) Program Pelayanan Perizinan Non Investasi

a. Pelaksanaan Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan Non Investasi, dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.212.000. dan realisasi sebesar Rp.34.121.750,- atau 99,74%. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya pelayanan perizinan non investasi. Keluaran Kegiatan ini adalah meningkatnya pelaku usaha di Kecamatan yang akan mengurus izin atau memperpanjang izinnya. Adapun total perizinan non investasi sebanyak 3.933 izin.

- **Kinerja Peningkatan Pelayanan Perizinan;** Untuk tahun 2015 ini pelayanan perizinan secara satu pintu di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah melayani 88 jenis layanan perizinan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 83 izin. Dengan bertambahnya jumlah izin yang ada diharapkan pelayanan perizinan dapat lebih efisien. Disamping itu juga telah adanya standar pelayanan yang bersertifikat ISO yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan system dan prosedur pelayanan dalam wadah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah perizinan yang telah di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah selama kurun satu tahun yaitu periode Januari – Desember 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.25 : Jenis Perizinan dan Jumlah yang dikeluarkan oleh BPMPD Tahun 2015

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH YANG DIKELUARKAN
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	17
2	Izin Usaha untuk berbagai sektor Usaha	-
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-
4	Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha	-
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	-
6	Izin Usaha Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha	-
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	-
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha	-
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	36
10	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	36
11	Izin Undang - Undang Gangguan (HO)	300

12	Izin Usaha Ketenaga Listrikan	-
13	Izin Penggalian	1
14	Izin Timbun	2
15	Izin Pemanfaatan Air (SIPA)	-
16	Jasa Penyalur BBM	-
17	Izin Pangkalan Gas	35
18	Izin Penimbunan BBM	-
19	Izin Usaha Kawasan Industri	-
20	Izin Perluasan Kawasan Industri	-
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	-
22	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	238
23	Tanda Daftar Gudang (TDG)	6
24	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	150
25	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	432
26	Izin Tempat Usaha – Minuman Beralkohol	8
27	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	7
28	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	-
29	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	-
30	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	-
31	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	-
32	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	-
33	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan hiburan dan Rekreasi	-
34	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	-
35	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	-
36	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	-
37	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	-
38	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	-
39	Tanda Daftar Usaha SPA	-
40	Izin Memerkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan	140
41	Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus	
42	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D	
43	Izin Klinik	3
44	Izin Praktek Bidan	1
45	Izin Praktek Perawat	11
46	Izin Tukang Gigi	
47	Izin Operasional Pemberantasan Hama	1
48	Izin Apotek	2
49	Izin Toko Obat	7
50	Izin Optik	
51	Izin Pengobat Tradisional	
52	Izin Air Minum Dalam Kemasan	
53	Izin air minum isi ulang	14
54	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	
55	Keterangan Sertifikasi Laik Sehat (tempat pengolahan makanan,minuman/jasa boga,restoran dan rumah makan)	23
56	Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut	

57	Izin Trayek Angkutan Darat	--
58	Izin Operasi Angkutan Darat	-
59	Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)	-
60	Izin Operasi Perusahaan non Pelayaran (SIOPNP)	-
61	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	-
62	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	-
63	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	-
64	Surat Izin Usaha Tally	-
65	Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas	-
66	Izin Lokasi Pelabuhan Khusus laut untuk Pelayanan Angkutan Laut	-
67	Izin Usaha Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air.	-
68	Persetujuan Kegiatan Salvage dan / atau Pekerjaan Bawah Air.	-
69	Persetujuan Kerjasama Operasi (Joint Operasional) Kegiatan Salvage dan Atau Pekerjaan Bawah air	-
70	Persetujuan Pembangunan dan atau Pemasangan Konstruksi dan/atau instalasi Bawah Air.	-
71	Izin Penggunaan Fasilitas disisi Air	-
72	Izin Praktek Dokter Hewan	-
73	Izin Klinik Hewan	
74	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan	-
75	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)	-
76	Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO)	-
77	Izin Perkebunan	-
78	Izin Usaha Perkebunan	-
79	Persetujuan Prinsip	2
80	Pemrosesan Administrasi Izin Lokasi (IL)	7
81	Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	-
82	Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan	-
83	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-
84	Rekomendasi Pembelian BBM jenis tertentu	3.833
85	Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan	-
86	Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan	-
87	Rekomendasi Izin Operasional Pelabuhan	-
88	Rekomendasi Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan	-
JUMLAH		5.312

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa iklim investasi di Bintan sangat kondusif di mata para investor maupun calon investor. Mengingat tingginya pengurusan izin baik perizinan investasi dan non investasi, Dan tentu saja pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan harus lebih bekerja keras lagi agar iklim investasi yang telah kondusif ini untuk terus dipelihara dan tetap terjaga pada stabilitas wilayah seperti keamanan, kepastian hukum dan tentu saja

menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung untuk investasi beserta sarana dan prasarananya.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih kurangnya SDM aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BPMPD Kabupaten Bintan, serta adanya pelaksanaan tugas ganda.
- b. Rentang kendali pelaksanaan koordinasi antar SKPD

2) Solusi

- a. Perlu adanya penambahan SDM aparatur pada BPMPD Kabupaten Bintan
- b. Meningkatkan intensitas koordinasi antara tim teknis internal dalam hal ini *Back office* dan tim teknis BPMPD dengan tim teknis eksternal dari beberapa instansi terkait di Kabupaten Bintan.
- c. Adanya satu kawasan yang menempatkan semua SKPD di Kabupaten Bintan sehingga mempermudah koordinasi antara BPMPD dan SKPD Kabupaten Bintan.

4.1.10.URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut : Persentase koperasi aktif **85,78%**; Jumlah UMKM Aktif 1.880 Unit; Jumlah BPR/LKM aktif **3 Unit**; Jumlah UKM non BPR/LKM UKM **15 Unit**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (KUKM)

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Berkeunggulan Sumberdaya Lokal dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.243.896.300,- dan realisasi sebesar Rp.238.261.700,- atau 97.69%. output dari kegiatan ini adalah adalah terlaksananya pendampingan kepada Koperasi atau KUKM yang akan diberi bantuan. Tahun ini diberikan kepada 7 (Tujuh) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) terdiri dari 6 (Enam) KUEP di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan 1 (satu) KUEP di Kecamatan Bintan Utara;
- (2) Kegiatan Pembekalan Ketrampilan Teknis bagi Koperasi Baru dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.965.320 dan realisasi sebesar Rp.111.706.750,- atau 98.02%. output dari kegiatan ini adalah Pembekalan Ketrampilan Teknis yang diberikan kepada pengurus koperasi sebanyak 40 (empat puluh) Koperasi di seluruh Kecamatan diwilayah Kabupaten Bintan.
- (3) Kegiatan Pemahaman Perkoperasian melalui Pendidikan Formal dan Non Formal Khusus Siswa SLTA dan SMK di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar 107.114.215 dan realisasi sebesar Rp.103.640.600 atau 96.76%. output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis Pemahaman Perkoperasian kepada sebanyak 165 Siswa SLTA dan SMK di Kabupaten Bintan dengan materi tentang perkoperasian serta pembentukan koperasi siswa sekolah antara lain : Sekolah Mandrasah Aliyah Madani di Kecamatan Toapaya sebanyak 45

siswa; SMAN 8 Bintan di Kecamatan Mantang sebanyak 40 siswa; SMKN 4 Bintan di Kecamatan Seri Kuala Lobam sebanyak 40 siswa dan SMK Muhammadiyah di Kecamatan Bintan Utara sebanyak 40 siswa.

b. Permasalahan dan solusi

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (KUKM) tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.152.716.320,- dan realisasi sebesar Rp.151.858.000,- (99,44%). Hasil kegiatan ini adalah pembinaan dan peningkatan kualitas kelembagaan untuk 60 (enam puluh) koperasi diwilayah Kabupaten Bintan;
- (2) Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.137.028.000,- dan realisasi sebesar Rp.133.323.250,- (97,30%). Hasil kegiatan ini adalah pelatihan manajemen administrasi keuangan untuk 40 (empat puluh) Koperasi diwilayah Kabupaten Bintan.

Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan menguatkan dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya

telah terbukti menjadi penopang kekuatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Keberadaan Koperasi terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan *leader* perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat *urgen* dan vital, upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik tatanan makro maupun mikro.

Tabel 4.26 : Jumlah Koperasi Di Kabupaten Bintan Tahun 2014 - 2015

NO	JENIS KOP	AKTIF	TIDAK AKTIF	ANGGOTA/ORANG	MODAL SENDIRI RP.JUTA	MODAL LUAR RP.JUTA	VOLUME USAHA	S H U RP.JUTA
1	KPRI	24	11	4.373	22.313	6.371	21.136	4.140
2	KUD	2	5	852	863	504	98	32
3	KSU	33	2	703	705	177	370	21
4	KOPANTREN	1	0	45	128	3	144	7
5	SEKUNDER	1	0	27	0	0	0	0
6	KOP. LAINNYA	114	11	6.082	15.413	4.446	15.660	1.497
	2015	175	29	12.082	39.422	11.501	37.408	5.697
	2014	195	32	24,882	39,555	14,084	24,642	6,112

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2015 (diolah)

b. Pelaksanaan Program

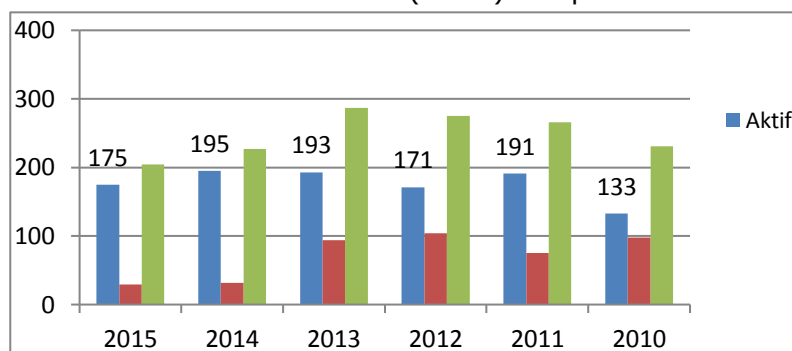
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Wirausaha dan UKM

a. Pelaksanaan Program

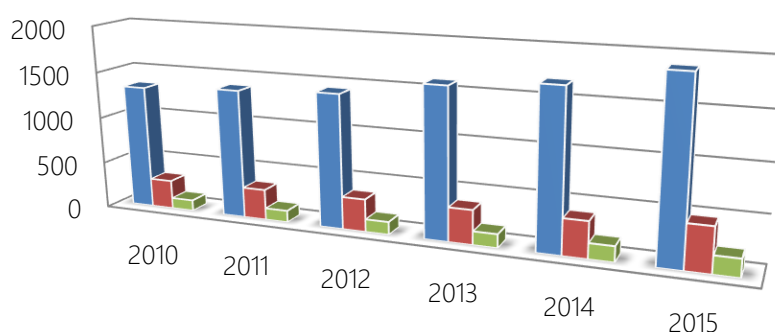
- (1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Dana Pemerintah bagi UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.59.572.015,- dan realisasi sebesar Rp.55.727.300,- (93,55%). Hasil kegiatan ini adalah terciptanya koordinasi antar instansi terkait serta pemanfaatan dana pemerintah bagi UMKM dimana pada tahun ini 6 (enam) koperasi di Kabupaten Bintan mendapatkan bantuan dari Kementrian Koperasi;
- (2) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengelola Kelompok Kalangan Kaum Perempuan di Daerah Tertinggal dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.141.830.000,- dan realisasi sebesar Rp.130.243.800,- (91,83%). Hasil kegiatan ini adalah pelatihan kewirausahaan untuk pengelola kelompok perempuan di daerah tertinggal untuk 68 (enam puluh delapan) kelompok usaha perempuan diwilayah Kabupaten Bintan;
- (3) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengelola UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran Rp.141.010.000,- dan realisasi sebesar Rp.112.321.800,- (79,66%). Hasil kegiatan ini adalah pelatihan kewirausahaan untuk pengelola UMKM sebanyak 50 (lima puluh) pengurus UMKM diwilayah Kabupaten Bintan.

Grafik 4.70 Jumlah Pelaku Usaha (UMKM) Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Grafik 4.71 Jumlah Pelaku Usaha (UMKM) Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015



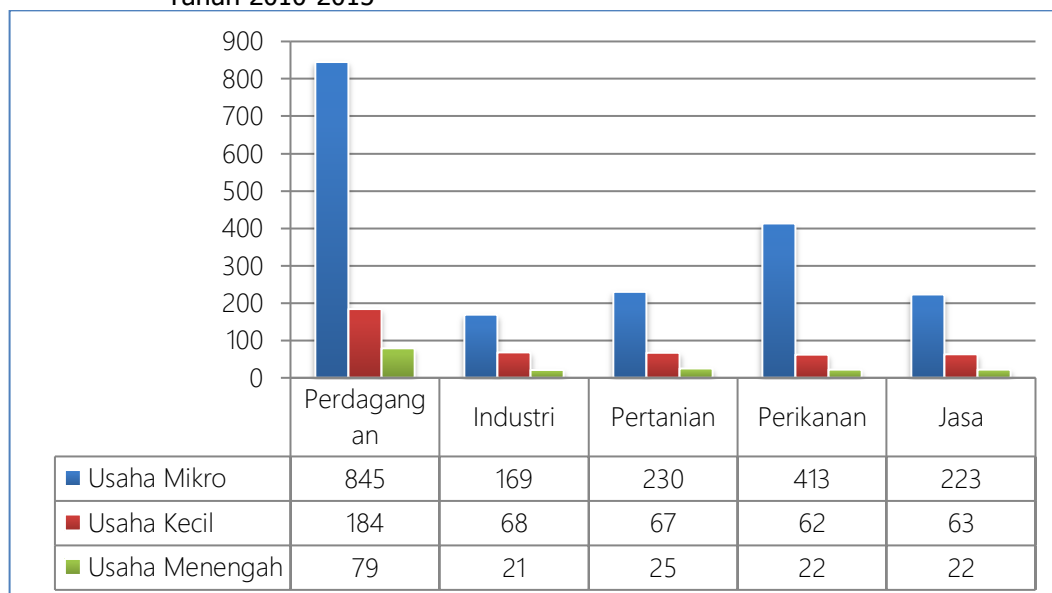
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
■ Usaha Mikro	1327	1377	1427	1593	1675	1880
■ Usaha Kecil	309	327	347	364	384	469
■ Usaha Menengah	115	125	135	144	164	189

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Perkembangan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Seperti pada Tabel diatas, dari jumlah pelaku Usaha Mikro tahun 2010 sebanyak 1.327 unit usaha, sampai dengan tahun 2014 berkembang menjadi 1.675 unit usaha yang secara terperinci dapat dikatakan bahwa selama enam tahun periode Tahun 2010-2015 terjadi pertambahan jumlah pelaku usaha sebanyak 553 unit usaha mikro dengan total persentase kenaikan sebesar 41,67 %. Sedangkan kategori Usaha Kecil pada tahun 2010 berjumlah 309 unit usaha berkembang menjadi 469 usaha pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 160 unit usaha atau terjadi peningkatan sebesar 51,78 %. Disisi lain untuk kategori Usaha Menengah juga mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, dimana

pada tahun 2010 terdapat 115 unit usaha dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 189 unit usaha dalam skala menengah atau terjadi pertambahan sebanyak 76 unit usaha dengan persentase pertumbuhan sebesar 64,35 %.

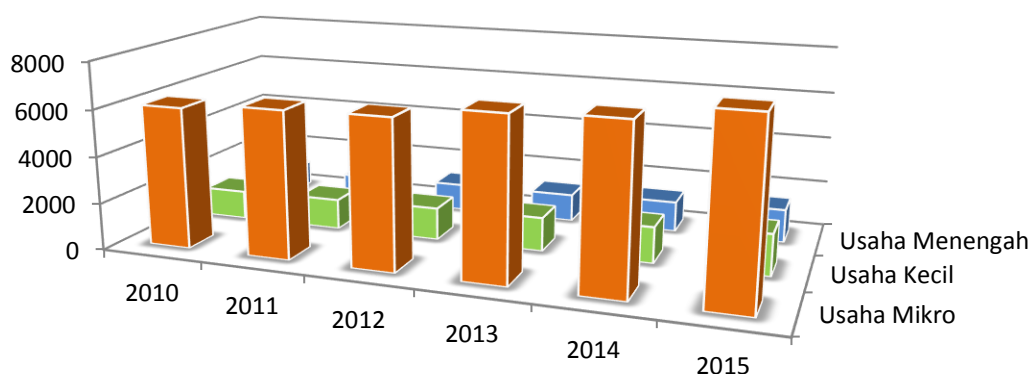
Grafik 4.72 : Jumlah Pelaku Usaha (UMKM) Berdasarkan Jenis Sektor Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Berdasarkan pengelompokan usaha menurut sektor terdapat lima sektor/kelompok usaha yaitu : sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan/ peternakan dan sektor jasa. Berdasarkan Tabel 10 diatas pelaku UMKM yang terbanyak pada sektor perdagangan dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 1.108 pelaku usaha yang terdiri dari 845 pelaku usaha pada usaha mikro, 184 pelaku usaha pada usaha kecil dan 79 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor industri terdapat 258 pelaku usaha yang terdiri dari pelaku usaha mikro 169 pelaku usaha, 68 pelaku usaha pada usaha kecil dan 21 pelaku usaha pada usaha menengah. Pada sektor pertanian/perkebunan terdapat 322 pelaku usaha yang terdiri dari 230 pelaku usaha mikro, 67 pelaku usaha kecil dan 25 pelaku usaha menengah. Pada sektor perikanan/peternakan terdapat 497 pelaku usaha yang terdiri dari 413 pelaku usaha mikro, 62 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menengah. Sedangkan pada sektor jasa terdapat 308 pelaku usaha yang terdiri dari 223 pelaku usaha mikro, 63 pelaku usaha kecil dan 22 pelaku usaha menengah.

Grafik 4.73 Jumlah Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Usaha Mikro	6026	6278	6350	6848	6980	7595
Usaha Kecil	1236	1306	1388	1450	1550	1775
Usaha Menengah	1085	1125	1168	1186	1311	1436

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang cukup besar pada angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Pada usaha mikro terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 6.026 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 7.595 pada tahun 2015, terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.569 orang atau bertambah sebesar 26,04 %. Untuk usaha kecil pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.236 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 1.775 orang atau terjadi pertambahan sebesar 314 orang atau bertambah sebesar 43,61 %. Sedangkan untuk usaha menengah pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 1.085 orang, bertambah menjadi 1.436 orang pada tahun 2015 atau terjadi pertambahan tenaga kerja sebanyak 351 orang tenaga kerja atau bertambah sebanyak 32,35 %. Secara total terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah

dalam rentang enam tahun dimana pada tahun 2010 berjumlah 8.347 orang meningkat menjadi 10.806 orang pada tahun 2015 artinya terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 2.495 orang atau penambahan sebesar 29.46 %. Secara keseluruhan terbentuknya UMKM dan/atau Kelompok-kelompok yang berkembang di wilayah Kabupaten Bintan turut memberikan kontribusi sebesar 7,70 % terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bintan sebesar 140.267 jiwa yang terdaftar pada tahun 2014.

Tabel 4.27 : Data Penyebaran UMKM Per-Kecamatan Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	TAHUN						%
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Bintan Timur	125	175	360	514	571	640	412%
2	Gunung Kijang	80	108	174	245	325	365	356%
3	Toapaya	35	48	75	135	135	165	371%
4	Teluk Bintan	50	80	100	159	173	195	290%
5	Teluk Sebong	35	45	75	150	165	187	434%
6	Bintan Utara	125	175	225	319	331	420	218%
7	Seri Kuala Lobam	37	42	74	125	125	175	372%
8	Bintan Pesisir	15	22	45	78	78	93	520%
9	Mantang	20	35	65	105	105	121	505%
10	Tambelan	25	65	70	98	110	110	340%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Tahun 2016

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Masih rendahnya SDM pengelola dan daya saing Koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar dan peluang usaha
- Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi dan informasi
- Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya
- Akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah
- Rendahnya kepedulian anggota terhadap perkembangan koperasi

2) Solusi

- a. Pelatihan bagi SDM pengelola KUKM dalam upaya peningkatan kualitas SDM dalam produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas nilai tambah produk yang dihasilkan KUKM dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- c. Fasilitasi promosi produk Koperasi dan UMKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar dan peluang usaha melalui kerjasama kemitraan antara BUMN dan BUMS.
- d. Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan.
- e. Peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) / Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- f. Melakukan sosialisasi tentang perkoperasian dikalangan anggota koperasi.

4.1.11.URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : Rasio penduduk ber KTP Elektronik (E-KTP) per 1000 penduduk telah menikah **757** Orang; Kepemilikan (KTP-elektronik) **93%**; Penerapan KTP elektronik Nasional berbasis NIK. **Sudah Dilaksanakan**;Rasio bayi berakte kelahiran per 100 Bayi Lahir **33 Orang**; Rasio pasangan berakte nikah per 1.000 pasangan penduduk menikah **1,7 Pasang**; Kepemilikan akta kelahiran penduduk **56%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program/Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.389.425.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.363.518.375,- atau 93%. Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya jaringan data, maintenance, perawatan dan pemeliharaan di setiap titik jarikomdat pada sarana yang dibangun di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Dari hasil sasaran tersebut terupdatenya data kependudukan yang akurat dan valid selama 1 tahun, yang mana kegiatan ini menjaga keamanan data, jaringan yang terkoneksi antar pusat ke Kabupaten dan kecamatan.
- (2) Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.82.303.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.78.147.400,- atau 95%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data base kependudukan yang akurasi dapat di maksimal dengan pembersihan data ganda melalui SIAK Online dan pengintegrasian perekaman KTP-elektronik (data penduduk per jenis kelamin, kelompok umur, agama dan status), yang mana sasaran dari hasil pelaksanaan ini diharapkan pada kegiatan pengembangan database pemilukada 2015,
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membantu dalam rangka pelaksanaan pemilukada 2015 yang akan datang dengan data data yang akurat dan valid sehingga dapat mencegah atau menutup peluang adanya data ganda dan pemalsuan data sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi

Masyarakat. Untuk data tercatat jumlah penduduk wajib KTP elektronik atau wajib memilih adalah 94.693 Jiwa dari Jumlah Penduduk 141.415 Jiwa, namun data ini masih berkembang dengan perubahan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan.

- (4) Kegiatan Penerapan KTP elektronik (KTP Elektrik), dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.89.946.731,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.707.450,- atau (98%). Hasil dari kegiatan ini adalah adalah penerapan KTP el lanjutan dari program nasional sehingga terwujudnya kepemilikan bagi penduduk Kabupaten Bintan. Hasil sasaran pelaksanaan penerapan KTP-el terekam tercatat 88.849 jiwa dari wajib KTP-el sebanyak 95.199 jiwa, selisih dari penduduk yang belum memiliki sebanyak 6.350 jiwa. Dimana penduduk yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah penduduk pemohon pemula memasuki usia wajib KTP el, penduduk pendatang yang belum melakukan perekaman KTP el dan penduduk Bintan tidak berkedudukan di Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum berfungsi maksimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD). Seperti proses pelayanan pencatatan sipil belum sepenuhnya menggunakan program tersebut.
- b. Faktor masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan

2) Solusi

- a. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi dengan Instansi terkait melalui informasi elektronik dan sosialisasi yang

menekankan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.

- b. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi dengan Instansi terkait melalui informasi elektronik dan sosialisasi yang menekankan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.

2) Program/Kegiatan Penataan Administrasi Catatan Sipil

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Implementasi sistem administrasi pencatatan sipil (membangun, updating dan pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.48.818.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.816.700 (100%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perawatan dan pemeliharaan sarana yang dibangun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam rangka updating dan kearsipan data pencatatan sipil selama 1 tahun, yang mana sasaran kegiatan ini menjaga keamanan data data penting, kevalidasi data yang akurat data penduduk Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Pengembangan database catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.83.013.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.296.200,- atau (99%). Hasil dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan kegiatan ini adalah terdatanya pengembangan database administrasi pencatatan sipil di Kabupaten Bintan. Yang mana pengembangan data tersebut menyangkut kepemilikan akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan tahun 2015. Hasil sasaran tersebut terpenuhinya database administrasi pencatatan sipil yaitu penduduk yang memiliki kepemilikan akta Kelahiran

sebanyak 79.430 jiwa yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 61.985 jiwa, Akta Kematian yang tercatat sebanyak 713 jiwa dan penduduk yang memiliki Akta Perkawinan sebanyak 53.119 jiwa sedangkan yang belum memiliki akta Perkawinan sebanyak 11.842 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 141.415 jiwa.

- (3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.308.144.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.300.196.900,- atau (97%). Hasil dari kegiatan ini adalah, peningkatan kepemilikan akta kelahiran. untuk tahun 2015 kelahiran di Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 3.114 jiwa dan meninggal sebanyak 32 jiwa maka kelahiran yang tercatat sebanyak 3.082 jiwa yang bersumber dari data Dinas Kesehatan, yang telah memiliki akta kelahiran <60 hari sebanyak 1.008 jiwa, Kepeilikan Akta Kelahiran >60 hari sebanyak 2.281 jiwa, jumlah akta kelahiran keseluruhan sebanyak 3.289 jiwa. Perolehan Akta Kelahiran adalah bayi yang lahir pada tahun 2015 , dan lahir pada bulan November + Desember 2015 yang dilaporkan pada bulan januari dan pebruari tahun 2016 masuk dalam <60 Hari, namun tidak termasuk jumlah bayi yang telah yang lahir pada bulan November dan Desember 2015 namun belum melaporkan dalam <60 hari.

b. Pelaksanaan Program

1) Permasalahan

Masih kurang aparatur dalam pelayanana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Solusi

- a. Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang.
- b. Tersedianya aparatur SDM pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainya.

3) Program /Kegiatan Pengawasan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pengawasan dokumen kependudukan dan pecatatan sipil melalui penerapan Siak dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.70.594.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.64.595.590,- atau (92%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dokumen kependudukan di Kabupaten Bintan sehingga terciptanya dan tertatanya dokumen kependudukan dari hasil pengawasan, hal ini masih terdapat data ganda sebanyak 238 jiwa hasil dari verifikasi data pusat.
- (2) Kegiatan Pengawasan Yustisia dan PERDA dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.164.042.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.151.886.995,- atau (93%). Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bintan dengan pelaksanaan Yustisia secara persuasive dilakukan dalam tertib dokumen kependudukan, dimana hasil sasaran ini di laksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan

Toapaya, Kecamatan Serikuala Lobam, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong. Dalam Yustisia tersebut masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP, KTP sudah mati, KTP luar daerah, Penduduk luar (Kabupaten/Kota) yang belum mengurus dokumen domisili dan tidak membawa KTP dalam berpergian. Hal ini perlu adanya kebijakan pemerintah dalam membentuk Perda hukum bagi penduduk sebagaimana tersebut diatas.

- (3) Kegiatan Pengembangan Data Base Pengawasan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.83.217.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.358.875,- atau (73%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan ini adalah tertibnya administrasi kependudukan dalam pengembangan database pengawasan administrasi kependudukan yang mana masih terdapat penduduk Kabupaten Bintan belum terdaftar atau tercatat dalam database kependudukan, hal ini perlu adanya kebijakan Pemerintah dalam penanganan penduduk yang sama sekali belum memiliki kedokumenannya.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Penduduk pendatang dari luar Kabupaten/Kota masih tidak memiliki akta lahir.

2) Solusi

- a. Perlu upaya meningkatkan koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat, propinsi kabupaten/kota lainnya, masyarakat, tokoh dan kepemudaan.

- b. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, perlu adanya Informasi berbasis teknologi maupun media public, himbauan, sosialisasi dan koordinasi melalui instansi pemerintah yang terkait di Kabupaten Bintan.
- c. Pentingnya pengawasan melalui kegiatan yustisi yang mampu dalam memotivasi mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga Masyarakat Kabupaten Bintan benar-benar sadar akan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

4.1.12.URUSAN KETENAGAKERJAAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Tingkat partisipasi angkatan kerja **65,01%**; Persentase pencari kerja yang ditempatkan **61,17%**; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi **66,67%**; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat **100%**; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan **100%**; Besaran pemeriksaan perusahaan **88,24%**; Besaran pengujian peralatan di perusahaan **87%**; Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun **15,9%**; Tingkat pengangguran terbuka **6,74%**; Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek **98,40%**; Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) **74%**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan

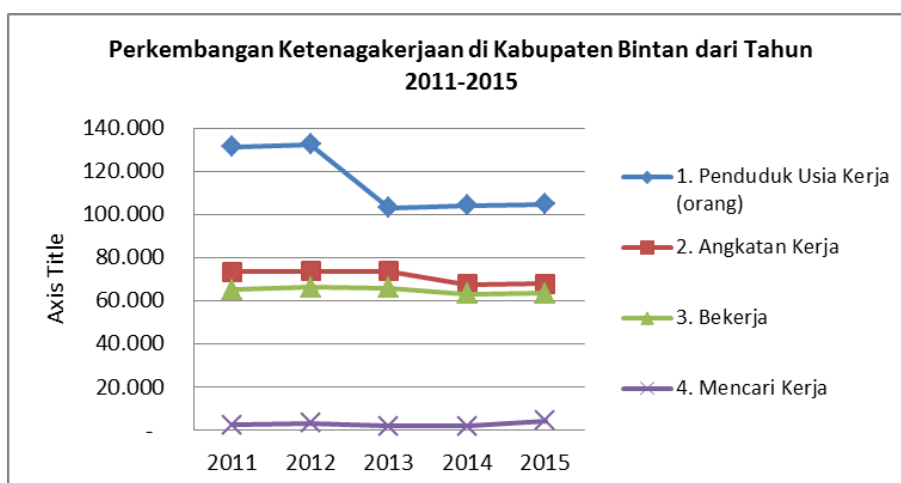
alokasi anggaran Rp.59.656.200,- dan realisasi sebesar Rp.59.596.800,- atau 99,9%. Output kegiatan ini adalah tersedianya informasi pasar kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMKN 3 Bintang Kecamatan Gunung Kijang melalui penyuluhan penempatan tenaga kerja kepada calon tenaga kerja sebanyak 50 orang, yang merupakan Tenaga Kerja pemula, Kegiatan ini juga berupa penyebarluasan informasi kebutuhan tenaga kerja kepada masyarakat.

- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.59.116.000 dan realisasi sebesar Rp.59.001.600 atau 99,8%, Output kegiatan ini adalah tersedianya data ketenagakerjaan, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang peserta yang berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan, Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya data ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan yang disusun dalam bentuk buku Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.1.337.854.750 dan realisasi sebesar Rp.1.327.826.200 atau 99,3%, Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Tenaga Kerja Sukarela di pedesaan, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penempatan Tenaga Kerja Sukarela yang berpendidikan sarjana sebanyak 48 orang di desa-desa dalam kecamatan Kabupaten Bintan, Anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai pembekalan TKS, insentif, transportasi, operasional pendukung kegiatan, Melalui kegiatan ini diharapkan Tenaga Kerja Sukarela mampu berperan aktif dalam pembangunan pedesaan, Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang kerja dan menekan angka pengangguran.

Dengan pencapaian Indikator Kinerja program sebagai berikut :

- **Tingkat partisipasi angkatan kerja;** Capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami turun naik. Pada tahun 2015 capaian indikator sebesar 65,01%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,87%. Hal ini mengindikasikan bahwasannya ada pertumbuhan ekonomi yang cenderung baik dan didukung oleh angkatan kerja yang semakin aktif masuk di dalam pasar kerja baik formal maupun informal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja adalah karena relatif berkurangnya angkatan kerja yang mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja melalui bidang Penempatan Tenaga Kerja yaitu melalui pelaporan AK.I. (kartu pencari kerja).

Grafik 4.74 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2016

- **Persentase pencari kerja yang ditempatkan;** Pada tahun 2014 capaian indikator mencapai sebesar 56,87% dan sedangkan pada tahun 2015 capaian indikator sebesar 61,17% terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 67,73%. Indikator ini berhubungan dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan (kesempatan kerja) dibanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (melalui Ak.I). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya

lapangan pekerjaan dan semakin besarnya kesempatan pencari kerja untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada di perusahaan.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Kualifikasi keterampilan calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kesempatan kerja. Solusinya adalah Pemenuhan kesempatan kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja.

2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Waktu Kerja Waktu Istirahat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.400.000 dan realisasi sebesar Rp.44.375.500 atau 99,9%, Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan waktu kerja dan waktu istirahat, Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan upah, upah lembur, hak cuti serta hak istirahat lainnya, Sasaran kegiatan ini adalah pekerja dan pengusaha sebanyak 70 orang untuk 2 (dua) kecamatan, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat yang artinya pengusaha memberikan apa yang menjadi hak normatif karyawan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan/Pengawasan Terpadu Norma Kerja Umum Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.104.834.200 dan realisasi sebesar Rp.104.434.200 atau 99,6%, Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan/ pengawasan terpadu norma kerja umum dan keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan/pengawasan dan juga pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi norma kerja umum dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Jumlah perusahaan yang diperiksa pada tahun 2015 sebanyak 98 perusahaan dengan sasaran pengusaha dan pekerja, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk meminimalisir pelanggaran dalam penerapan aturan ketenagakerjaan di perusahaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dunia usaha.

- (3) Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.50.680.000 dan realisasi Rp.59.830.500 atau 99,7%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan di 2 (dua) kecamatan dengan peserta dari unsur pekerja dan pengusaha sebanyak 70 orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sejak tahun 2011 kecelakaan kerja di Kabupaten Bintan relatif berkurang. Ini dapat dilihat dari data yang disajikan dalam tabel 4.5.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

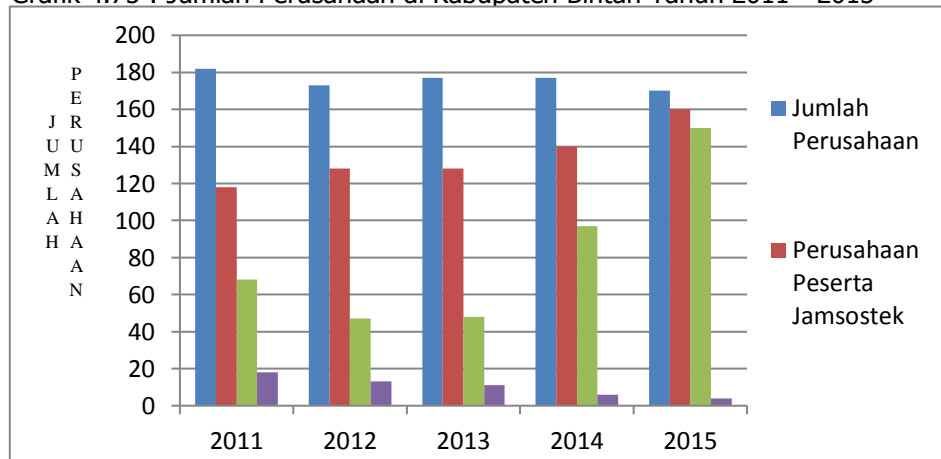
- **Persentase kasus PHK yang terselesaikan;** Data untuk Persentase kasus PHK yang terselesaikan sebagai berikut : kasus yang masuk sebanyak 22 kasus, 16 kasus diselesaikan secara Perjanjian Bersama dan 4 kasus sudah terselesaikan di tingkat

Pengadilan Hubungan Industri (PHI) sedangkan 2 kasus masih dalam proses karena baru masuk pada akhir Desember 2015. Sehingga capaian kasus PHK yang terselesaikan pada tahun 2015 sebesar 90,9%. Angka ini mendekati nilai target yang ditentukan yaitu 100%.

- **Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian;** Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 namun masih dibawah angka 1 seperti yang ditargetkan. Pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian sebesar 0,06% lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan rincian jumlah kecelakaan yang menyebabkan luka berat dan kematian sebanyak 10 (sepuluh) orang dari jumlah tenaga kerja 16.471 orang. Rendahnya angka kecelakaan kerja mengindikasikan bahwa pengusaha dan pekerja telah mengerti dan menjalankan peraturan tentang kecelakaan tenaga kerja UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan menteri tentang peraturan-peraturan terkait.
- **Besaran pemeriksaan perusahaan;** Target besaran pemeriksaan perusahaan tahun 2015 sebesar 96%. Namun capaiannya adalah sebesar 88,24% atau 150 perusahaan dari 170 perusahaan yang terdaftar. Angka capaian ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini karena pemeriksaan perusahaan tidak hanya dilakukan dari kegiatan APBD. Dari kegiatan APBD yaitu kegiatan Pemeriksaan/ pengawasan terpadu norma kerja umum dan keselamatan dan kesehatan kerja telah tercapai 98 perusahaan, dari dana dekon tahun 2015 tercapai 30 perusahaan dan dari dana Disnakertrans Prov. Kepri tercapai 22 perusahaan.

- **Besaran pengujian peralatan di perusahaan;** Target besaran pengujian peralatan di perusahaan tahun 2015 sebesar 100 % atau sebanyak 178 peralatan dari 178 peralatan yang terdaftar. Namun capaiannya adalah sebesar 87% atau sebanyak 195 peralatan yang diuji dari 225 peralatan yang terdaftar. Hal ini disebabkan adanya sebanyak 29 unit peralatan yang belum diuji karena perusahaan pemilik peralatan dimaksud sudah tidak aktif lagi melaksanakan kegiatannya, sehingga peralatannya juga sudah lama tidak digunakan.

Grafik 4.75 : Jumlah Perusahaan di Kabupaten Bintan Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2015

Tabel 4.28 : Jumlah Kecelakaan Kerja di Kabupaten Bintan dari Tahun 2011-2015

No	Jenis Kecelakaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecelakaan ringan	133	145	231	132	164
2	Kecelakaan berat	0	27	3	11	9
3	Meninggal	5	1	1	2	1
	Jumlah	138	173	235	145	174

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2015

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Kurangnya jumlah pegawai teknis ketenagakerjaan baik pegawai pengawas spesialis dan umum maupun pegawai pengantar kerja.
- Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan aturan ketenagakerjaan.

2) Solusi

- a. Meningkatkan frekuensi dan efektifitas Pemeriksaan/ Pengawasan perusahaan
- b. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat Pegawai Pengawas Spesialis dan umum maupun Diklat Pegawai Pengantar Kerja.

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyuluhan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.687.500 dan realisasi sebesar Rp.45.687.450 atau 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan/penyuluhan Lembaga Kerja Sama Bipartit. Dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan dengan peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari unsur pekerja dan pengusaha. Melalui kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah terbentuknya serta optimalnya fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Hingga tahun 2015 LKS Bipartit yang sudah terbentuk adalah 17 lembaga di perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.49.580.000 dan realisasi Rp.49.357.000 atau 99,6%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB). Kegiatan ini dilaksanakan di 2

kecamatan di Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta 80 orang dari unsur pengusaha dan pekerja. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

- (3) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.512.997.500 dan realisasi Rp.512.568.050 atau 99,9%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penetapan upah minimum kabupaten (UMK). Hasilnya berupa 1 (satu) dokumen Penetapan UMK Kabupaten Bintan. Sistem pengupahan di Kabupaten Bintan dari tahun ketahun semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengupahan Kabupaten Bintan yang terus meningkat. Pada tahun 2011 tingkat upah di Kabupaten Bintan tercatat Rp.975.000,- dan pada tahun 2015 telah mencapai Rp.2.372.213,- , Data ini dapat dilihat pada tabel dibawah
- (4) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.345.250.300 dan realisasi sebesar Rp.340.063.700 atau 98,5%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi kebijakan lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, sosialisasi UMK dan studi banding ke Dewan Pengupahan Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk koordinasi terkait masalah ketenagakerjaan. Melalui kegiatan ini diharapkan optimalisasi fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Hasilnya berupa 1 dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit.

- (5) Kegiatan Penyuluhan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.49.180.000 dan realisasi Rp.49.150.000 atau 99,9%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hubungan industrial yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan di 2 (dua) kecamatan dengan peserta dari unsur pekerja dan pengusaha sebanyak 80 orang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang cenderung menurun tiap tahunnya (tabel 4,3), namun Pada tahun 2012 angka perselisihan naik signifikan karena banyak perusahaan yang tutup, adanya penundaan pembayaran UMK dan tidak ada kesepakatan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pemicu perselisihan.
- (6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Serikat Pekerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.89.260.000 dan realisasi Rp.76.904.950 atau 86,2%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serikat pekerja. Sasarannya adalah 5 (lima) Serikat Pekerja (SP) yang ada di Kabupaten Bintan. Bentuk kegiatan ini adalah menciptakan sinergi serta memfasilitasi Serikat Pekerja agar pekerja dan pengusaha mengetahui dan memahami serta melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antara Serikat Pekerja, pengusaha dan pekerja.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan;** Capaian persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 92,6%, angka ini kurang sedikit dari

target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari 27 kasus yang masuk dapat diselesaikan 25 kasus baik di tingkat perantara maupun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) , 2 kasus lagi belum terselesaikan karena masuk pada akhir Desember 2015.

- **Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun;** Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012 – 2014 namun mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 15,9%. Angka sengketa ini masih lebih besar dari target 2015 yaitu sebesar 5,75%. Angka sengketa pengusaha pekerja adalah jumlah sengketa dalam setahun per jumlah perusahaan yang terdaftar. Jumlah sengketa pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus dari 170 perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
- **Tingkat pengangguran terbuka.** Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,74%, lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Indikator Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Semakin kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan semakin rendahnya angka pengangguran. Angkatan kerja yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang menggunakan pelaporan AK I cenderung menurun, hal ini disebabkan lowongan kerja disektor formal menurun sedangkan sektor informal meningkat sangat signifikan dan tenaga kerja tersebut tidak mendaftarkan dirinya. Sehingga hal ini berpengaruh positif terhadap angka pengangguran terbuka.
- **Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK;** Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek pada tahun 2015 sebesar 98,40%. Setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka ini lebih besar dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 97%. Capaian ini

menunjukkan bahwa dari 16.471 jumlah pekerja, 16.208 diantaranya adalah peserta jamsostek aktif. Hal ini bisa diartikan bahwa pengusaha dan tenaga kerja sudah mengerti tentang kewajiban ikut serta dalam jamsostek seperti yang tertuang dalam UU No. 03 Tahun 1992 tentang Program Jamsostek.

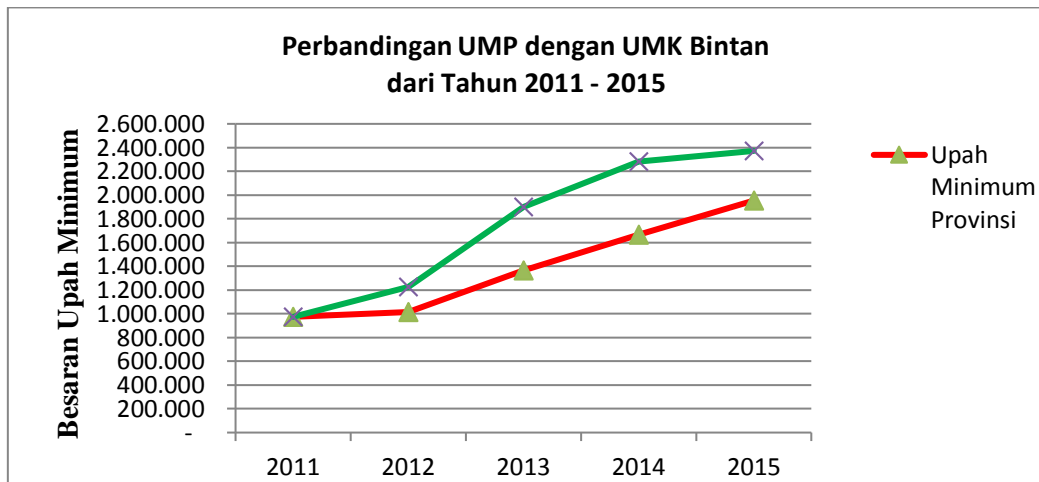
- **Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama;** Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014 namun mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2015 . Capaian tahun 2015 sebesar 74%, lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari 27 kasus yang dicatatkan, 20 kasus diantaranya diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Hal ini disebabkan tidak ditemukan kata sepakat antara pihak yang berselisih sehingga diberikan anjuran dan dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Tabel 4.29 : Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)					
	a. Jumlah Perselisihan Hubungan Kerja (PHI) (kasus)	8	41	22	20	27
	b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	828	558	434	42	112
	c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus)	7	25	13	16	20
	d. Jumlah Tenaga Kerja (org)	822	531	409	30	45
	e. Diteruskan ke PHI (Kasus/PHI)	3	8	8	4	5
	f. Jumlah Tenaga Kerja (org)	698	27	18	12	34
2	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)					
	a. Jumlah PHK (kasus)	8	8	14	15	22
	b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	828	546	402	32	112
	c. Diselesaikan Tk. Perantara (kasus)	7	7	9	11	16
	d. Jumlah Tenaga Kerja (org)	822	523	379	21	45
	e. Diteruskan ke PHI (kasus/PHI)	3	3	4	4	4
	f. Jumlah Tenaga Kerja (org)	698	23	16	11	34

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan, Tahun 2016

Grafik 4.76 : Perbandingan UMP dengan UMK Bintang dari Tahun 2011 - 2015



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintang, Tahun 2016

Tabel 4.30 : Perbandingan UMP dengan UMK Bintang dari Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perusahaan	182	173	177	177	170
2	Upah Minimum Provinsi (Rp.)	975.000	1.015.000	1.356.087	1.665.000	1.954.000
3	Upah Minimum Kabupaten (Rp.)	975.000	1.225.000	1.900.000	2.283.000	2.372.213

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintang, Tahun 2015

b. Permasalahan Dan Solusi

1) Permasalahan

- Masih banyaknya perselisihan hubungan industrial yang belum dapat diselesaikan secara Bipartit.
- Usulan angka Upah Minimum Kabupaten Bintang ke Bupati masih bervariasi.

2) Solusi

- Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara karyawan dan pengusaha dengan cara melaksanakan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan
- Meningkatkan sinkronisasi internal Dewan Pengupahan Kabupaten Bintang

4) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Satuan Pengamanan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.450.000.000 dan realisasi Rp.449.658.958 atau 99,9%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan satuan pengamanan. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 30 orang. Pesertanya adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bintan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pelatihan satuan pengamanan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi tenaga kerja satuan pengamanan (Satpam). Pelatihan Satpam ini memberikan kontribusi positif dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapatkan kesempatan kerja sebagai satpam untuk mengisi lowongan yang ada di perusahaan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mendukung capaian indikator RPJMD yaitu Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi. Setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 8,33% dan tahun 2015 sebesar 66,67%.
- (2) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.155.286.968 dan realisasi Rp.154.354.030 atau 99,4%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan keterampilan tenaga kerja berbasis masyarakat pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan menjahit untuk 32 orang di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya dan Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang. Hasilnya adalah tersedianya tenaga kerja terampil di pedesaan.

Kegiatan ini mendukung indikator RPJMD yaitu Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;** Capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi setiap tahun meningkat secara signifikan dan memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 capaian sebesar 66,67% lebih kecil dari tahun sebelumnya, hal ini karena dari 45 peserta yang mendaftar pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Satuan Pengaman hanya diambil 30 peserta yang dilatih yang memenuhi kualifikasi.
- **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;** Capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 100%, angka lebih besar dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat sama dengan jumlah pendaftarannya.
- **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;** Capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 100%, angka ini lebih besar dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan jumlah peserta yang mendapat pelatihan kewirausahaan sama dengan jumlah pendaftarannya.
- **Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk;** Capaian indikator rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 246, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 168,65. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja (rasio lulusan DIV/S1/S2/S3) meningkat menjadi lebih baik. Dalam 10.000 penduduk terdapat 246 lulusan DIV/S1/S2/S3. Indikator ini merupakan bagian dari

indikator kualitas sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- **Rasio Ketergantungan;** Capaian indikator rasio ketergantungan tahun 2014 sebesar 52,44% mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat diartikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif sebanyak lebih kurang 2:1. Angka ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu sebesar 45%.

b. Permasalahan dan solusi

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

5) Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Lokal

a. Pelaksanaan Program

Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Penduduk Lokal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.196.422.000 dan realisasi Rp.195.722.450 atau 99,6%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan peningkatan usaha mandiri melalui program terapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan serta bantuan alat TTG dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, dilaksanakan di Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang dan Desa Seborg Pereh Kecamatan Teluk Seborg. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan telah dapat menciptakan peluang dan kesempatan kerja di sektor informal / usaha mandiri dalam pengemasan (packaging) keripik buah, kerupuk ikan dan lain-lain.

Dengan pencapaian indikator kinerja program sebagai berikut :

- Rasio penduduk yang bekerja; Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 0,93 hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu 0,95. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa dari angkatan kerja yang ada sebanyak 93%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Lapangan Pekerjaan Sesuai Kapasitas Lokal tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.13.URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : Persentase ketersediaan pangan masyarakat **100%**; Regulasi ketahanan pangan **ADA**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Pelatihan Menu Alternatif (Kuliner Berkelanjutan). Dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.220.000,- dan realisasi sebesar Rp.120.820.000 (98,85%). Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas produk pangan dan gizi. Ruang lingkup kegiatan antara lain : Lomba masak B2SA (berimbang, bergizi sehat dan aman) bagi 20 orang Kelompok Wanita di 10 Kecamatan dan Lomba KRPL (Kawasan

Rumah Pangan Lestari) bagi 16 orang Kelompok Wanita di 9 Kecamatan (tidak termasuk Kec. Tambelan).

- (2) Kegiatan Pengolahan Produk Pangan Lokal. Dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.463.037.800,- dan realisasisebesar Rp.409.401.650,- (88,42%). Output dari kegiatan ini adalah optimalisasi pengolahan pangan lokal. Ruang lingkup kegiatan antara lain perjalanan dinas monev dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, Belanja alat penepungan 20 unit alat spinner dan 10 unit blender.
- (3) Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Pangan. Dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.088.250,- dan realisasi sebesar Rp.238.209.790,- (90,54%). Output kegiatan ini adalah optimalnya mutu produk pangan. Ruang lingkup kegiatan antara lain sosialisasi pelatihan penggunaan bantuan hibah ke masyarakat alat pembuat bakso 10 unit dan blender 5 unit bagi 36 petani di 6 kecamatan.
- (4) Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.640.000,- dan realisasi sebesar Rp.58.452.150,- (96,40%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Operasional Dewan Ketahanan Pangan . Ruang lingkup kegiatan antara lain : Pertemuan Tim Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan sebanyak 55 orang (45 PNS dan 10 org Non PNS) sebanyak 3 kali membahas permasalahan ketahanan pangan.
- (5) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan diversifikasi pangan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.74.245.900,- (87,30%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya

Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan diversifikasi pangan. Ruang lingkup kegiatan antara lain: Pembayaran kekurangan honor Tim Pangan Desa, Tim Pendamping P2KP, Tim Pendamping Desa Mandiri Pangan, Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi kegiatan Desa Mandiri Pangan dan ATK.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bintan dan masih ada beberapa titik daerah terindikasi rawan pangan sehingga memerlukan adanya penyusunan peta situasi dan neraca pangan masyarakat yang bisa memberi informasi secara jelas.
- b. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/ LSM dan pihak swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.

2) Solusi

- a. Peran Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bintan dapat lebih dioptimalkan dengan tersusunnya peta situasi dan neraca pangan masyarakat secara jelas sebagai langkah untuk mengatur kebijakan-kebijakan.
- b. Meningkatkan konsumsi makanan non beras sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada makanan pokok beras yang jumlahnya terbatas, lewat budi daya makanan lokal non beras (ubi, jagung, palawija, hortikultura) baik itu dengan memanfaatkan fungsi lahan pekarangan, ladang. Selain itu perlu ditingkatkan uji coba dan uji terap di beberapa lahan basah atau lahan tidur yang ada untuk tanaman padi.

2) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (GAPOKTAN) dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.437.496.000,- dan realisasi sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp.411.283.400,- (94,01%). Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelembagaan petani. Ruang Lingkup kegiatan antara lain : Perjalanan dinas monev dalam daerah, pertemuan di Kecamatan, pembinaan dari pejabat dan penyuluh kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), publikasi dan dokumentasi.
- (2) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.005.400,- dan realisasi sebesar Rp.102.799.600,- (99,80%). Output kegiatan ini adalah terlaksananya Mimbar Sarasehan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup kegiatan antara lain : diskusi dan tanya jawab dari Kelompok Tani dan KTNA dengan Instansi Pemerintah/ Swasta terkait antara lain : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan, BPPKP Kabupaten Bintan, Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Bappeda Kabupaten Bintan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kep. Riau
- (3) Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Praktek Sistem Ganda (PSG) SMK Bintan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.55.486.200,- atau (94,85%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknologi pertanian system ganda untuk siswa SMK Bintan. Ruang Lingkup kegiatan antara lain survey

lapangan, penentuan lokasi praktek (lahan dan calon peserta SMK), bantuan kompensasi lahan, pengarahan dan pembinaan dari BPPKP Kabupaten Bintan kepada 8 siswa SMK 3 Bintan.

- (4) Fasilitasi Penilaian BP3K, Penyuluh, Kelompok Usaha Petani dan Nelayan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.780.000,- dan realisasi sebesar Rp.40.361.710,- (94,35%).Kelompok Usaha Petani dan Nelayan. Output dari kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi Penilaian BP3K, Penyuluh, Kelompok Usaha Petani dan Nelayan. Ruang lingkup kegiatan antara lain: pembentukan tim penilai, penilaian BP3K, Penyuluh, Kelompok Usaha Petani dan Nelayan serta bantuan uang pembinaan prestasi bagi obyek kegiatan terbaik.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Pada tahun 2015 semua indikator kinerja kegiatan di RPJMD sudah melampaui target. Realisasi fisik kegiatan baik itu konversi maupun pembangunan mencapai 100 % sedangkan realisasi keuangan mencapai 95,11%. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah mengakibatkan Pemda Kabupaten Bintan pada umumnya dan Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan khususnya mengalami efisiensi anggaran yang kalau dihitung mencapai 17% dari APBD Murni semula. Adanya kegiatan Pelatihan Gabungan Kelompok Tani (Klompencapir) yang kena kebijakan pemangkasan 1 (satu) RKA tetapi sudah ada pencairan ATK sebesar Rp.1.800.000,- menyebabkan anggaran kegiatan ini hanya sebesar Rp.1.800.000,- sampai anggaran perubahan (APBD-P) Tahun 2015 atau dapat

dikatakan pagu anggarannya terkecil, namun laporan fisik tetap 100%, keuangannya 90,81%.

- b. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan.
- c. Kurang lebih 80% lembaga penyuluhan belum ditetapkan.
- d. Jumlah Penyuluh tidak seimbang dengan jumlah Desa. ataupun jumlah petani, jumlah penyuluh saat ini 22 orang, jumlah Desa / Kelurahan 51.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan
- f. Ada kecenderungan penurunan jumlah kelompok tani dan anggota kelompok tani pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014. Keadaan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor permasalahannya, antara lain : beralihnya profesi atau mata pencaharian petani ke profesi lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. Faktor lainnya bisa jadi kurang motivasi dari para penyuluh lapangan didalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping sekaligus motivator dan pembinaan.
- g. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/ LSM dan pihak swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.

2) Solusi

- a. Perlu diadakan suatu kegiatan di APBD murni maupun melalui penyuluhan-penyuluhan di lapangan kepada kelompok tani/ nelayan untuk menggalakkan budidaya tanaman yang mendukung suplai 9 bahan pokok utama kebutuhan sehari-hari sehingga akan mengurangi ketergantungan bahan tersebut dari daerah luar.

- b. Perlu peningkatan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan dimasa mendatang
- c. lembaga penyuluhan seharusnya ditetapkan.
- d. Perlunya penambahan jumlah Penyuluh Pertanian
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan
- f. Perlu pengkajian tentang sebab-sebab menurunnya minat petani untuk tetap semangat mengolah lahan pertaniannya dan perlu lebih ditingkatkan lagi motivator-motivator dari para penyuluh lapangan dengan beberapa metode yang telah mereka kuasai sesuai dengan perkembangan iptek.
- g. Perlu peningkatan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penumbuhan kelembagaan budidaya, konsumsi maupun usaha yang menggalakkan produksi pangan lokal, seperti Dinas Pertanian, LSM, swasta lainnya.

3) Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.790.000,- dan realisasi sebesar Rp.171.039.335,- (85,18%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Penyusunan Program dan Programa masing-masing Penyuluh BPPKP Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup kegiatan antara lain : Penyusunan/ diskusi tentang program penyuluhan di tingkat Kelompok Tani, Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.440.000,-. dan realisasi

sebesar Rp.102.145.360,- (96,88%). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Kecamatan. Ruang Lingkup kegiatan antara lain : belanja modal sarana dan prasarana untuk Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yaitu alat timbangan gram (neraca analitik), sound system serta belanja barang / jasa antara lain pakain kerja lapangan (jaket, topi, jas hujan, sepatu boot, tas lapangan) untuk penyuluh.

- (3) Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.337.200.000,-. dan realisasi sebesar Rp.335.661.371,- (99,54 %). Output kegiatan ini adalah terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Ruang Lingkup kegiatan antara lain : Penyuluhan kepada petani tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman dilanjutkan praktek lapangan untuk 250 petani di 10 Kecamatan. Selain itu ada bantuan seminar kit, bibit tanaman, pupuk, obat-obatan untk peserta.

b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Penyuluhan Petani tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Teknologi dan Informasi Pertanian dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Jumlah dana Rp.185.917.173,- dan realisasi sebesar Rp.174.402.877,- (93,81%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan, informasi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan. Ruang lingkup kegiatan antara lain : belanja bahan

demplot untuk 21 penyuluh, pembagian brosur-brosur penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

b. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Walaupun capaian indikator RPJMD terlampaui tetapi masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas outputnya sesuai dengan urusan SKPD yang harus dijalankan. Karena di wilayah Kabupaten Bintan masih mempunyai desa-desa yang terindikasi rawan pangan dan kebutuhan 9 bahan pokok utama masih banyak mendatangkan dari daerah luar.
- b. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pencairan karena kesalahan didalam penyusunan SPP/SPM dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- c. Ada kegiatan konversi yang realisasi fisiknya 100 % tetapi realisasi keuangannya hanya 53,04 % yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM) yang berarti ada sisa uang yang tidak terpakai. Keadaan tersebut disebabkan karena ada kebijakan pencairan SPP/ SPM dari kegiatan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas para penyuluh lapangan dan mobil dinas (2 mobil dinas dan 22 kendaraan dinas penyuluh) yang pemenuhannya diberikan dalam bentuk kupon setiap bulan. Ternyata sampai akhir tahun masih bersisa banyak anggarannya atau dapat dikatakan kurang tepat rencana penganggarannya.
- d. Ada kegiatan yang sebenarnya bisa direalisasikan pada APBD murni tetapi terpaksa harus direalisasikan pada APBD Perubahan karena dana yang terbatas dari APBD murni , yaitu Sewa Gedung BPK Teluk Sebong sebesar Rp.6.000.000, dan pendampingan APBN yang bersifat wajib yaitu pembayaran honor-honor kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan sebesar Rp.85.000.000,-

- e. SDM penyuluh masih terbatas jumlahnya, yaitu hanya ada 22 orang, terdiri dari Penyuluh Pertanian sebanyak 14 orang berstatus PNS, ditambah 1 orang PTT yang menjadi Penyuluh Pertanian, 1 orang Penyuluh Pertanian THLTBPP, 2 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), dan 2 Penyelia Mitra Tani (PMT), dan perlu ditingkatkan keahliannya, baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun ketrampilan-ketrampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas.
- f. Penyuluh swadaya di Kabupaten Bintan sebanyak 31 orang belum pernah mendapat pelatihan / pembinaan secara optimal.

2) Solusi

- a. Perlu diadakan suatu kegiatan di APBD murni maupun melalui penyuluhan-penyuluhan di lapangan kepada kelompok tani/ nelayan untuk menggalakkan budidaya tanaman yang mendukung suplai 9 bahan pokok utama kebutuhan sehari-hari sehingga akan mengurangi ketergantungan bahan tersebut dari daerah luar.
- b. Perlu peningkatan dan kejelian didalam menyusun SPP/SPM dengan unsur-unsur yang terkait antara lain Pengguna Anggaran, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan dan PPTK.
- c. Perlu lebih kejelian dari perencanaan program dan PPTK dalam menyusun Renja APBD supaya tepat sasaran dan perlunya penambahan dana rutin dari APBD Perubahan.
- d. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh di masing-masing Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) serta mengusulkan tambahan jumlah personil penyuluh, karena jumlah yang ada sekarang tidak seimbang dengan jumlah desa/ keluarahan yang ada di Kabupaten Bintan.

- e. Mengadakan pelatihan kepada para penyuluh swadaya dengan dana APBD Murni/ Perubahan.

4.1.14.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam**. terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif) **19,7%**; Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta **34,1%**; Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan **13,3%**; Persentase Perempuan dalam Angkatan Kerja **11,84%**; Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas **45,9%**; Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian **10,40%**; Rasio KDRT **0,01%**; Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan **100%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pelaksanaan Program

- (1) Sosialisai/Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dengan dana Rp.91.458.300 Terealisasi Sebesar Rp.90,848,360 (99.33%). Kegiatan ini adalah untuk mendukung operasional P2TP2A didalam pelaksanaan tugas perlindungan perempuan (trafficking, KDRT, Pornografi, Pelecehan Seksual dan Hak asuh anak). Pada tahun 2015 tercatat jumlah kasus trafiking sebanyak 3 orang, KDRT (anak dan perempuan) sebanyak 2 orang; Kekerasan seksual 9 orang, Pelecehan/pencabulan sebanyak 13 orang dan Penelantaran 2 orang.
- (2) Jambore PKK, dengan dana Rp.191.892.000 dan terealisasi sebesar Rp.174.450.780 atau (90.91%) dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang yang berasal dari 10 kecamatan se

Kabupaten Bintan. Kegiatan Jambore PKK merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan PKK dimasing-masing wilayah, sehingga dapat mendukung program pemerinath daerah disegala bidang.

- (3) Workshop Pola Asuh Anak, dengan dana Rp.103.400.000 dan terealisasi sebesar Rp.93.065.868 (90.01%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak yang baik dan benar sehingga tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Peserta kegiatan ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari kader PKK, Guru, dan tokoh masyarakat perwakilan dari masing-masing Kecamatan se Kabupaten Bintan.
- (4) Pembinaan dan Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan, dengan dana Rp.86,586,390,- Terealisasi Sebesar Rp.77.058.580 (89%). Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya Program Pemberdayaan Perempuan di setiap Kecamatan yaitu Gerakan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak, Bina Keluarga Balita, Perusahaan Yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan, Program Peningkatan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera, Kelompok Bina Keluarga Balita. Keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan diraihnya penghargaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan dengan predikat I Nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2014.
- (5) Penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan usia muda di Kabupaten Bintan dengan dana Rp.100.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.93.317.610 (97,54%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan pada usia muda sehingga diharapkan masyarakat

Bintan terutama remaja tidak berfikir untuk segera menikah sehingga akan lebih produktif di usia yang masih muda.

- (6) Pertemuan Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kab. Bintan, dengan dana Rp.100.729.000. Terealisasi Sebesar Rp.96.424.225 (95.73%). Hasil Kegiatan ini adalah telah terlaksananya Rapat Kerja PUG yang melibatkan SKPD dilingkungan Kabupaten Bintan, meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dan terimplementasikannya anggaran Responsif Gender disetiap SKPD (1 program dan 2 kegiatan); telah diterbitkannya Produk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan.
- (7) Pengadaan APE Indoor disetiap Kecamatan di Kabupaten Bintan dengan alokasi dana sebesar Rp.168.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.164.937.665 (98.18%). Kegiatan ini adalah untuk menyediakan alat peraga edukasi disetiap kecamatan bertujuan untuk mempermudah petugas maupun kader dalam memberikan penyuluhan di masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat akan meningkat.
- (8) Update Data Anak dengan alokasi dana Rp.70.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.67.390.300 (96,27%) kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan jumlah anak di Kabupaten Bintan sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah.

Keberhasilan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan program ini dapat dilihat dari diraihnya penghargaan **Anugrah Kota Layak Anak Tingkat Pratama pada tahun 20015**. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI di Jakarta 2015.

b. Permasalahan dan Solusi

Banyaknya kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak baik itu anak usia sekolah (PAUD,TK,SD,SMP dan SMA) di Kabupaten Bintan,

penelantaran anak dan pencabulan dimana pada tahun 2015 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 28 orang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelaporan dan penanganan korban tindak kekerasan melalui penyuluhan, sosialisasi, meningkatkan kapasitas dan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang diadakan pemerintah daerah (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A).

4.1.15.URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : Rasio akseptor KB **82,03**; Angka penggunaan kondom **1,2%**; Rata-rata jumlah anak per keluarga **2,45** Orang; Cakupan peserta KB aktif **77,1%**;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Keluarga Berencana

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyediaan alat-alat kontrasepsi dan pelaksanaan momentum Keluarga Berencana-Kesehatan (KB-KES) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.168.810.000 dan realisasi sebesar Rp.107.348.250 atau (63.59%). Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Alat-Alat Kontrasepsi dan Terlaksananya Pelayanan KB-KES, Alat Kontrasepsi yang dimaksud adalah : Microginon (pil KB), Cyclofem (suntik KB 1 Bulan), Triclofem(suntik KB 3 Bulan), Andalan Lactasy dan IUD. Alat Kontrasepsi ini dibagikan secara cuma-cuma pada saat pelaksanaan kegiatan KB ataupun kesehatan seperti acara Ulang Tahun PKK, TNI dan IBI dan

lainnya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah KB aktif dengan sasaran pasangan usia subur (PUS).

- (2) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Kontrasepsi Tetap (KONTAP) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.75.940.000 dan realisasi sebesar Rp.73.208.750 atau (96.4%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kontrasepsi tetap (KONTAP) di Kabupaten Bintan. Yaitu melalui pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang seperti MOP dan MOW. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pemasangan kontrasepsi tetap bekerjasama dengan RSUD Propinsi Kepri dengan sasaran 30 orang, terdiri dari pemasangan MOP 12 akseptor dan MOW 30 akseptor. Kegiatan ini mendukung cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Bintan dimana cakupan ini terus meningkat. Pada tahun 2011 prosentase cakupan mencapai 59% sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 82,45%. Sudah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 65%.
- (3) Kegiatan Review Keluarga Berencana oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.91.352.200,- dan realisasi sebesar Rp.49.87.275 atau (54.6%). Hasil dari kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana yang melibatkan Dokter, Koordinator Pelayanan KB, Bidan Praktek, Kepala Puskesmas, Camat dan Lurah dalam upaya pencapaian target-target indikator kinerja program KB untuk dapat meningkatkan koordinasi pelayanan keluarga berencana

b. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- a. Masih rendahnya pemahaman remaja dan keluarga remaja terhadap program-program KB sehingga angka melahirkan anak usia dibawah 20 tahun masih relatif tinggi
- b. Masih rendahnya peran serta sekolah dalam Program Generasi Berencana (Genre).

- c. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh khususnya dalam penanganan program Keluarga Berencana.
- d. Masih kurangnya tenaga PLKB, dan kader KB untuk melakukan penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi
- e. Masih kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Alat Kontrasepsi Tetap (KONTAP).

2) Solusi

- a. Perlunya pembinaan dan sosialisasi untuk pendewasaan usia perkawinan dalam rangka mengurangi resiko angka kematian terhadap ibu-ibu muda (AKI) akibat belum siapnya si Ibu secara fisik dan mental.
- b. Perlunya upaya pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) mengenai kesehatan reproduksi.
- c. Perlunya dilakukan optimalisasi pendataan keluarga program Keluarga Berencana.
- d. Mengadakan sosialisasi tentang Keluarga Berencana-Mekanisme Kontrasepsi jangka panjang (KB-MKJP) yaitu MOP dan MOW bagi PUS yang sudah memiliki anak lebih dari 3 orang dan tidak ingin beranak lagi.

2) Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga

a. Pelaksanaan Program

- (1) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kader KB dan PLKB oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.115.501.000 dan realisasi sebesar Rp.115.501.000 atau (100%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dana untuk honor Kader KB sebanyak 51 orang yang berada di setiap Desa dan Kelurahan dan honor untuk PLKB sebanyak 10 orang yang berada di setiap Kecamatan.

- (2) Kegiatan peningkatan kualitas program Pusat Informasi konseling remaja (PIK-R) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.108.766.500 dan realisasi sebesar Rp.107.980.050 atau (99,28%). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Jambore PIK R tingkat SLTA se Kab Bintan yang dilaksanakan di pantai Trikora dengan peserta 150 orang siswa SMA.
- (3) Kegiatan Updating Pendataan Keluarga Berencana oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.73.140.000 dan realisasi sebesar Rp.67.934.000 atau (92,88%). Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah keluarga yang ikut ber KB, metode KB yang digunakan, jumlah PUS dan WUS dengan total keluarga 366 KK.
- (4) Kegiatan Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Rp.289.659.420 dan realisasi sebesar Rp.288.966.900 atau (99,76%). Hasil dari kegiatan ini adalah penyuluhan dengan mengundang masyarakat sebanyak 250 orang, materi yang disampaikan adalah Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Ketahanan Pemberdayaan Keluarga tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana